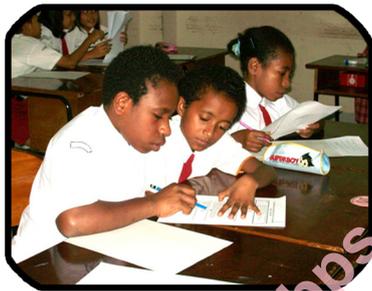




NO. KATALOG : 930201.9100

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT 2009



<http://papuabaratsps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009

Nomor Publikasi : 91300.10.02
Katalog BPS : 4102002.9100
Ukuran Buku : 16,5 x 21,5 cm
Jumlah Halaman : x rumawi + 133 halaman

Naskah :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Gambar Kulit :

Bidang IPDS
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Diterbitkan oleh :

BPS Provinsi Papua Barat

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.



GUBERNUR PAPUA BARAT SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira diterbitkannya publikasi ***Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat 2009*** oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.

Data dan informasi statistik yang disajikan dalam publikasi ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat di dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program pembangunan manusia telah mampu meningkatkan kualitas manusia terutama pada derajat kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat yang telah berupaya menerbitkan buku ini saya mengucapkan terima kasih dan bagi para perumus kebijakan, arah pembangunan manusia harus lebih mendapatkan perhatian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat
Terima kasih.

Manokwari, Agustus 2010
GUBERNUR PAPUA BARAT

ABRAHAM O. ATURURI

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) PROVINSI PAPUA BARAT**

SAMBUTAN

Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan di segala bidang menuntut tersedianya data statistik yang lengkap, akurat, mutakhir, dan berkesinambungan terutama guna menunjang terwujudnya perencanaan yang tepat, pengawasan yang baik, serta evaluasi kritis terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai

Terutama pada pembangunan manusia, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat berusaha menyajikan gambaran tentang sumber daya manusia dan komponen-komponen yang digunakan dalam penyusunan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat untuk memberikan gambaran perkembangan pembangunan manusia yang teraktualisasikan dalam publikasi ***Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2009***.

Data dan informasi statistik yang dicakup dalam publikasi ini, dibutuhkan tidak hanya oleh Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat, namun juga oleh berbagai konsumen data. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat dan semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Manokwari, Agustus 2010

**Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi
Papua Barat**
Kepala,


DRS. ISHAK L. HALLATU
NIP. 195703241980021002

KATA PENGANTAR

Publikasi **Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2009** ini tersaji atas kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua Barat. Secara garis besar publikasi ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2009.

Adapun data dan informasi yang disajikan terdiri dari situasi pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat, hasil penghitungan besaran IPM beserta komponen-komponen serta perkembangannya, disparitas IPM antar wilayah, dan posisi absolut antar wilayah dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia secara simultan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Manokwari, Agustus 2010

**Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua Barat
Kepala,**



Ir. Tanda Sirait, MM.
NIP. 19550721 197801 1 002

Daftar Isi

Sambutan Gubernur Provinsi Papua Barat	i
Sambutan Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	8
1.3 Manfaat Penulisan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
II. Metodologi	11
2.1 Sejarah Penghitungan IPM	11
2.2 Sumber Data	12
2.3 Metode Penyusunan Indeks	12
2.4 Besaran Skala IPM	19
III. KONDISI UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT 2009	20
3.1 Kependudukan	20
3.2 Kondisi Kesehatan	27
3.2.1 Sarana Kesehatan	28
3.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat	35
3.3 Kondisi Pendidikan	47
3.3.1 Angka Melek Huruf	50
3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah	53
3.3.3 Angka Partisipasi Sekolah	55
3.3.4 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	61
3.3.5 Angka Mengulang dan Putus Sekolah	64
3.3.6 Rasio-rasio Pendidikan	67
3.3.7 Tingkat Kelulusan Siswa	71
3.3.8 Fasilitas Pendidikan	73

3.4	Kondisi Perekonomian	77
3.4.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	77
3.4.2	Struktur Ekonomi Regional	79
3.4.3	Pertumbuhan Ekonomi	81
3.4.4	PDRB per Kapita	82
IV	Perkembangan Komponen IPM 2007-2009	85
4.1	Perkembangan Kesehatan	86
4.2	Perkembangan Pendidikan	88
4.2.1	Perkembangan Angka Melek huruf	88
4.2.2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah	90
4.3	Perkembangan Paritas Daya Beli	92
4.4	Perkembangan IPM	94
4.5	Reduksi Shortfall	98
V	Disparitas IPM Antar Wilayah	101
5.1	Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat	102
5.2	Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota secara Nasional	107
5.3	Perbandingan Absolut Antar Daerah Dalam Diagram Kuadran	109
5.3.1	IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	109
5.3.2	IPM Terhadap PDRB per Kapita	116
5.4	Analisis Indeks Disparitas Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat	120
VI	Penutup	123
	Daftar Pustaka	126
	Lampiran	129

Daftar Tabel

No	Judul Tabel	Hal.
2.1	Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dalam Penghitungan IPM	18
3.1	Jumlah Penduduk, Persentase Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk/Km ² Papua Barat Tahun 2009	24
3.2	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes di Provinsi Papua Barat Tahun 2009	31
3.3	Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2009	32
3.4	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009	34
3.5	Persentase Tenaga Penolong Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009	38
3.6	Persentase Penggunaan Imunisasi Pada Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009	39
3.7	Persentase Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2008	42
3.8	Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009	45
3.9	Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009	46
3.10	Persentase Kemampuan Penduduk Usia 10 Tahun Keatas membaca Huruf Latin, Huruf Arab, Huruf Linnya dan Angka Buta Huruf Provinsi Papua Barat Tahun 2009	53
3.11	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2007-2009	57

3.12	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2007-2009	59
3.13	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Papua Barat 2009	62
3.14	Jumlah Siswa Mengulang dan Persentase Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2008	64
3.15	Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Persentase Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2008	66
3.16	Tabel Rasio-rasio Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2008	68
3.17	Tingkat Kelulusan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2008	71
3.18	Persentase Fasilitas Perpustakaan Terhadap Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA di Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2008	74
3.19	Persentase Fasilitas Laboratorium Terhadap Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA di Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2008	75
3.20	PDRB Menurut Kabupaten/Kota ADHB dan ADHK Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009 (Juta Rupiah)	78
3.21	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi papua Barat Tahun 2007-2009	80
3.22	PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009 (Rupiah)	83
4.1	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009	87
4.2	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provisni Papua Barat Tahun 2007-2009	89
4.3	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provisni Papua Barat Tahun 2007-2009	91
4.4	Paritas Daya Beli Menurut Kabupaten/Kota di Provisni Papua Barat Tahun 2007-2009	93
4.5	IPM dan Perubahan Menurut Kabupaten/kota di	95

4.6	Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009 Reduksi Shortfall Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009	99
5.1	IPM dan Peringkat Nasional IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009	108

<http://papuabarat.bps.go.id>

Daftar Gambar

No.	Judul Gambar	Hal.
2.1	Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia	13
3.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Papua Barat Tahun 1971-2009	21
3.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Papua Barat Tahun 1971-2009	22
3.3	Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat Tahun 2009	25
3.4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Dependency Ratio Provinsi Papua Barat Tahun 2009	26
3.5	Jumlah Rumah Sakit yang Telah Beroperasi dan Rasio Penduduk-Rumah Sakit di Papua Barat Tahun 2009	29
3.6	Jumlah Rumah Sakit Menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2009	30
3.7	Rata-rata Anak Lahir Hidup dan Masih Hidup Menurut Kelompok Wanita Usia Subur di Provinsi Papua Barat Tahun 2009	36
3.8	Persentase Tingkat Keluhan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2009	41
3.9	Persentase Penggunaan Fasilitas Air Bersih Provinsi Papua Barat Tahun 2009	44
3.10	Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009	51
3.11	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2009	54
3.12	Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009	56
3.13	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Tahun 2003-2009 (%)	82
5.1	Boxplot IPM Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2009	104

5.2	Dendogram Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2009	105
5.3	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat Tahun 2007	110
5.4	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat Tahun 2008	112
5.5	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat Tahun 2009	114
5.6	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan PDRB per Kapita di Provinsi Papua Barat Tahun 2007	117
5.7	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan PDRB per Kapita di Provinsi Papua Barat Tahun 2008	118
5.8	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan PDRB per Kapita di Provinsi Papua Barat Tahun 2009	119

<http://papuababel.blogspot.com>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja perekonomian suatu daerah seringkali diukur dengan besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan parameter keberhasilan kinerja ekonomi yang identik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut Konferensi Internasional bertema Asia 2015 di London pada 6-7 Maret 2006 paradigma tersebut tidak selamanya efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan.

Besaran PDRB Provinsi Papua Barat pada tahun 2009 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 14.547,73 miliar, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 6.768,20 miliar. Sementara pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2009 sebesar 6,26 persen terhadap tahun 2008 (*year on year*). Pertumbuhan PDRB tanpa migas pada tahun 2009 mencapai 7,36 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB dengan migas yang besarnya 6,26 persen. Semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2009 dengan pertumbuhan tertinggi di sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 15,98 persen dan sumber pertumbuhan tertinggi pada sektor industri pengolahan yaitu sebesar 1,55 persen.

Jumlah penduduk miskin Provinsi Papua Barat tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 246,5 ribu jiwa (35,12 persen) menjadi 256,84 ribu jiwa (35,71 persen). Tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat ini terutama

terkonsentrasi di daerah perdesaan mencapai 248,29 ribu jiwa (96,67 persen) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan hanya sebesar 8,55 ribu jiwa (3,33 persen).

Indikator ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat yang terpenting adalah terkait isu pengangguran. Jumlah pengangguran mengalami peningkatan pada Agustus 2009 menjadi 26.626 orang dibandingkan dengan kondisi Agustus 2008 sebesar 26.189 orang. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kondisi Agustus 2009 justru mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2008 yaitu dari 7,65 persen menjadi 7,56 persen. Meskipun angka TPT Provinsi Papua Barat mengalami penurunan namun target Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Propenas) 2004-2009 (kontribusi dari angka seluruh provinsi di Indonesia) mengamanahkan capaian 5,13 persen pada akhir tahun 2009 belum dapat dicapai, mengingat selisih 2,43 persen masih terlalu berat untuk direalisasikan sampai batas akhir pencapaian target.

Kinerja perekonomian yang diukur dengan besaran nilai PDRB agar sebesar-besarnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat maka pendapatan tersebut harus terdistribusi secara merata. Pengukuran seberapa besar pemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran konsumsi masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien *gini ratio*. Bila dibandingkan *gini ratio* tahun 2007-2009 di Provinsi Papua Barat diperoleh fakta bahwa ketimpangan distribusi pendapatan semakin meningkat. Hal ini dijelaskan dari semakin besarnya koefisien *gini ratio* yang mengalami peningkatan dari 0,33 di tahun 2007 menjadi 0,36 di tahun 2008. Di tahun 2009 koefisien *gini ratio*

mengalami penurunan menjadi 0,35 persen yang mengindikasikan distribusi pendapatan mengalami sedikit perbaikan.

Tingkat pemerataan pendapatan menurut Bank Dunia dengan mengelompokkan menjadi 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan teratas juga menggambarkan kondisi yang serupa. Ketidakmerataan pendapatan terutama terjadi pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah dan 20 persen berpendapatan teratas. Pada tahun 2008 pada kelompok berpendapatan rendah, distribusi pendapatan yang semestinya diterima 40 persen penduduk ternyata hanya 18,08 persen. Sementara pada kelompok penduduk dengan pendapatan teratas yang semestinya menerima distribusi pendapatan sebesar 20 persen ternyata pada kelompok ini menikmati 41,68 persen dari total pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat tahun 2009 mencapai 6,26 persen atau lebih tinggi dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,55 persen akibat terkena dampak krisis global pada sepanjang tahun 2009. Relatif tingginya capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dinilai belum efisien karena disisi lain persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka masih tergolong tinggi. Disamping itu koefisien *gini ratio* yang tidak mengalami perbaikan yang signifikan menggambarkan distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga pendapatan yang dihasilkan tidak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa pengukuran keberhasilan pembangunan yang hanya didasarkan pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi saja dirasakan kurang efektif. Diperlukan sebuah

parameter lainnya yang bersama-sama dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kemudian muncullah sebuah paradigma untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi manusia atau lebih dikenal dengan pembangunan manusia.

Mengapa pembangunan manusia?. Banyak alasan mengapa pembangunan manusia mendapatkan tempat yang istimewa dalam program pembangunan. Dalam sejarah didunia terbukti bahwa sangat jarang negara yang mampu berkembang dan tumbuh hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang dimilikinya. Korea Selatan dan Korea Utara adalah sebuah contoh kontras keberhasilan dan kegagalan pembangunan. Korea Utara jauh tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan yang miskin sumber daya alam tetapi sukses dalam mengembangkan sumber daya manusia. Disamping itu pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dianggap mampu mengurangi kemiskinan menjadi kurang efektif tanpa diimbangi dengan pengurangan kesenjangan pendapatan. Fakta lainnya yaitu di Amerika Latin membuktikan bahwa tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan telah menghambat potensi-potensi pertumbuhan ekonomi. Masalah itu sebagian besar timbul karena negara-negara Amerika Latin cenderung mengabaikan investasi pada manusia, khususnya rumah tangga miskin. Akibatnya, saat kesempatan ekonomi meluas, kelompok rumah tangga ini tertinggal dan pada gilirannya menimbulkan masalah sosial.

Perbaikan kesenjangan hanya bisa dicapai dengan melakukan investasi pada pembangunan manusia, baik dalam meningkatkan akses

dan kualitas di bidang pendidikan maupun meningkatkan akses, kualitas, dan layanan di bidang kesehatan.

Pembangunan manusia adalah suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Di antara pilihan-pilihan hidup yang terpenting adalah pilihan untuk hidup sehat, untuk menikmati umur panjang dan sehat, untuk hidup cerdas, dan berkehidupan mapan.

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama, yaitu:

- **Produktivitas.** Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.

- **Ekuitas.** Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

- **Kesinambungan.** Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup harus dilengkapi.

- **Pemberdayaan.** Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Tingkat capaian pembangunan manusia telah mendapatkan perhatian dari penyelenggara negara agar hasil-hasil pembangunan

tersebut dapat diukur dan dibandingkan. Terdapat berbagai ukuran pembangunan manusia yang telah dibuat, namun tidak seluruhnya dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran standar yang dapat digunakan untuk perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Oleh karena itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks komposit ini terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/*purchasing power parity* (PPP). Indikator angka harapan hidup merefleksikan dimensi hidup sehat dan umur panjang. Indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah merepresentasikan output dari dimensi pendidikan. Indikator kemampuan daya beli untuk menjelaskan dimensi hidup layak.

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia. Hal ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dan memperluas pilihan-pilihan manusia (*enlarging the choice of the people*). Dua faktor penting yang dinilai efektif dalam pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

Capaian pembangunan manusia yang tinggi diperlukan sebuah percepatan untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi tiap daerah. Berdasarkan pengalaman pembangunan manusia di beberapa negara, untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan dengan distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh

sukses adalah Korea Selatan yang tetap konsisten mengaplikasikan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil harus mengalami kegagalan karena ketimpangan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan (UNDP, Bappenas, BPS, 2004).

Perhatian pemerintah Indonesia akan isu perkembangan pembangunan manusia kini semakin baik. Hal ini ditandai dengan dijadikannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar wilayah (*fiscal gap*) dan memacu percepatan pembangunan di daerah. Alokator lain yang digunakan untuk mendistribusikan DAU adalah luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Dengan adanya DAU diharapkan daerah yang mempunyai IPM rendah mampu untuk mengejar keteringgalannya dari daerah lain yang mempunyai IPM lebih baik karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Namun hal ini tergantung pada kebijakan dan strategi pembangunan dari masing-masing daerah apakah mampu memanfaatkan kucuran dana yang ada untuk mencapai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia secara lebih baik.

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2009” ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kondisi, posisi dan perkembangan pembangunan manusia serta komponen-komponen penyusunnya dibandingkan dengan daerah lain dan periode sebelumnya.

1.2. Tujuan Penulisan

Secara umum publikasi ini menyajikan data dan analisis indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2009. Untuk melihat perkembangan dan keterbandingan antar waktu serta wilayah, data disajikan dari tahun 2007-2009 untuk membandingkan dengan kondisi sebelumnya serta disajikan menurut kabupaten/kota.

Secara khusus, tujuan dari penulisan publikasi ini adalah:

1. Memberikan gambaran kondisi umum pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2007-2009.
2. Menyajikan analisis indeks pembangunan manusia dan perkembangannya serta komponen-komponen indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2007-2009.
3. Menyajikan analisis disparitas pembangunan manusia antar wilayah di Provinsi Papua Barat tahun 2009.

1.3. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dari penyusunan publikasi ini adalah:

- Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dalam memantau proses pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat secara berkesinambungan.
- Selain sebagai sumber informasi dalam pemantauan pembangunan manusia, data dan informasi dalam publikasi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam perencanaan pembangunan manusia pada tahap pembangunan selanjutnya.

- Publikasi ini dapat dijadikan rujukan atau referensi keilmuan bagi masyarakat pendidikan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2009 disusun menjadi beberapa bab dan diorganisasikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab permulaan yang dimulai dengan latar belakang pentingnya penyusunan publikasi yang menggambarkan proses pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat. Ulasan selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari publikasi ini. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II Metodologi mengulas sumber data, sejarah penghitungan IPM dan metode penyusunan indeks. Metode penghitungan masing-masing komponen IPM juga disertakan dalam sub bab metode penghitungan IPM.

Bab III Kondisi Umum Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat memberikan gambaran secara lengkap hasil-hasil pembangunan manusia. Pembahasan difokuskan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

Bab selanjutnya menganalisis perkembangan komponen IPM 2007-2009. Pembahasan diperluas dengan melakukan komparasi pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat dengan nasional, pembahasan perkembangan IPM dan reduksi *shortfall*.

Bab V mengulas disparitas IPM antar wilayah. Didalamnya dapat diketahui bagaimana posisi relatif IPM kabupaten/kota di tingkat provinsi

dan posisi relatif provinsi di tingkat nasional dari peringkat capaian IPM kabupaten/kota menurut peringkat provinsi dan nasional. Analisis IPM diperdalam dengan melakukan perbandingan keberhasilan ekonomi dan pembangunan manusia dalam analisis kuadran.

Publikasi ini ditutup dengan Bab VI. Bab Penutup ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran yang berisi ringkasan dari paparan pada Bab III dan bab VI sekaligus sebagai jawaban atas tujuan dari penyusunan publikasi ini.

<http://papuabarat.bps.go.id>

BAB II METODOLOGI

2.1 Sejarah Penghitungan IPM

IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan pembangunan manusia (*Human Development Report*) dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pembangunan kualitas manusia di 177 negara.

Di Indonesia, pemantauan pembangunan manusia mulai dilakukan pada tahun 1996. Laporan pembangunan manusia tahun 1996 memuat informasi pembangunan manusia untuk kondisi tahun 1990 dan 1993. Cakupan laporan pembangunan manusia terbatas pada level provinsi. Mulai tahun 1999, informasi pembangunan manusia telah disajikan sampai level kabupaten/kota.

IPM Provinsi Papua Barat mulai dihitung sejak tahun 2005. Provinsi Papua Barat merupakan provinsi pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Provinsi Irian Jaya Barat memenuhi kelengkapan syarat sebuah pemerintahan provinsi paska pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang menetapkan Abraham Octavianus Atururi (Brigjen Marinir Purn.) dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed sebagai gubernur dan wakil gubernur yang dilantik pada tanggal 26 Juli 2006. Publikasi IPM ini mengawali penerbitan rutin buku IPM Provinsi Papua Barat.

2.2 Sumber Data

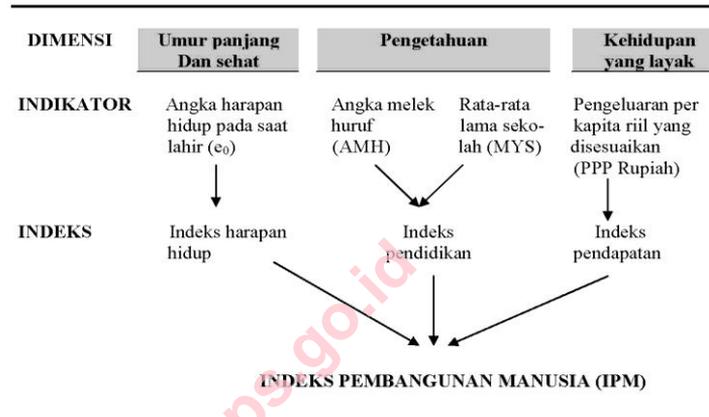
Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah:

- ✚ Susenas Kor: digunakan untuk menghitung indikator seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan penghitungan pengeluaran per kapita.
- ✚ Susenas Modul Konsumsi: digunakan untuk menghitung daya beli masyarakat Provinsi Papua Barat yang didasarkan pada 27 komoditas.
- ✚ Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2009: digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan manusia pada kurun waktu 2007 – 2009.
- ✚ PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009: digunakan untuk melihat PDRB kabupaten/kota, PDRB Provinsi Papua Barat, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita sebagai gambaran pembangunan perkenomian.

2.3 Metode Penyusunan Indeks

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat (lama hidup sehat) diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) yang telah disesuaikan. Penjelasan rinci metode penghitungan masing-masing komponen IPM sebagai berikut:

Gambar 2.1 Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia



Angka harapan hidup pada saat lahir

Angka harapan hidup pada saat lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut kelompok umur. Adapun langkah-langkah penghitungan angka harapan hidup adalah:

- Mengelompokkan umur wanita dalam interval 15 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, dan 45 – 49 tahun.
- Menghitung rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin menurut kelompok umur pada huruf a di atas.
- Input rata-rata anak lahir hidup dan anak masih hidup pada huruf b pada paket program *MORTPACK* sub program CEBCS.

- d. Gunakan metode Trussel untuk mendapatkan angka harapan hidup saat lahir. Referensi waktu yang digunakan 3 atau 4 tahun sebelum survei.
- e. Untuk mendapatkan angka harapan hidup pada tahun 2007 - 2009 dilakukan dengan ekstrapolasi.

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang dapat membaca huruf latin atau huruf lainnya. Adapun langkah-langkah penghitungan angka melek huruf adalah:

- a. Menghitung jumlah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.
- b. Menghitung jumlah penduduk 15 tahun atau lebih yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.
- c. Membagi jumlah penduduk pada huruf b dengan jumlah penduduk pada huruf a dikalikan 100.

Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Langkah-langkah penghitungan rata-rata lama sekolah sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.

- b. Melakukan konversi variabel tingkat pendidikan yang ditamatkan ke variabel lama sekolah.
- c. Menghitung rata-rata lama sekolah dengan melakukan agregat data menggunakan fungsi *mean*. Untuk menghitungnya dapat menggunakan paket Program SPSS.



Paritas Daya Beli yang Disesuaikan

Langkah-langkah menghitung paritas daya beli adalah:

- a. Menghitung pengeluaran per kapita, y .
- b. Menghitung pengeluaran per kapita yang dimark up 20 persen,
 $y_1 = y \times (1,20)$.
- c. Menghitung pengeluaran riil, y_2 dengan membagi y_1 dengan indeks harga konsumen.
- d. Menghitung paritas daya beli dari 27 komoditi dengan persamaan:

$$PPP / unit = \frac{\sum_{j=1}^{27} E_{i,j}}{\sum_{j=1}^{27} (P_{9,j}^* Q_{i,j})}$$

PPP = paritas daya beli,

E_{ij} = Pengeluaran komoditas ke $-j$ di Kabupaten ke- i Provinsi Papua Barat,

$P_{9,j}$ = Harga komoditas ke $-j$ di Jakarta Selatan,

$Q_{i,j}$ = volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Kabupaten ke- i Provinsi Papua Barat.

Khusus komoditi rumah sewa, unit kualitasnya ditentukan berdasarkan indeks kualitas rumah. Indeks kualitas rumah dihitung berdasarkan kualitas dan fasilitas rumah tinggal dari tujuh variabel. Ketujuh variabel ini diberi skor berdasarkan karakteristik yang sesuai (lihat lampiran 3).

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan skor dibagi dengan delapan. Sebagai contoh, sebuah rumah tangga menempati rumah berlantai tanah (0), ber dinding kayu (0), luas lantai per kapita 18 meter per segi (1), beratap seng (0), menggunakan penerangan listrik (1), minum dari air hujan (0), jamban milik sendiri (1). Maka skor indeks kualitas rumah adalah $4/8 = 0,50$. Artinya, kuantitas rumah yang dikonsumsi rumah tangga tersebut adalah 0,50 unit.

- e. Menghitung $y_3 = y_2/PPP$.
- f. Mengurangi y_3 dengan formula Atkinson sebagai berikut:

Formula Atkinson

$$C_{(i)}^* = \begin{cases} C_{(i)} & \text{jika } C_{(i)} < Z \\ Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} & \text{jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\ Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} & \text{jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\ Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} & \text{jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z \end{cases}$$

Dengan:

$C_{(i)}$ = PPP dari pengeluaran riil per kapita, y_3 .

Z = Batas pengeluaran yang ditetapkan, biasanya garis kemiskinan.



Menghitung IPM

- a. Setelah masing-masing komponen IPM dihitung, maka masing-masing indeks dihitung dengan persamaan:

Dengan:

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\text{min})})}{(X_{(i-\text{maks})} - X_{(i-\text{min})})}$$

$X_{(i,j)}$ = Indeks komponen ke- j dari kabupaten ke- i ;

$X_{(i-\text{min})}$ = Nilai minimum dari X_i

$X_{(i-\text{maks})}$ = Nilai maksimum dari X_i

Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing indeks tercantum pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dalam Penghitungan IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	UNDP menggunakan <i>Combined Gross Enrollment Ratio</i>
Daya Beli	732.720 ^a	300.000 360.000 ^b	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan yang baru

b. Menghitung indeks pengetahuan :

$$X_2 = \frac{2}{3}(X_{21}) + \frac{1}{3}(X_{22})$$

Dengan:

X_{21} = Indeks Melek Huruf

X_{22} = Indeks Lama Sekolah

c. Nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \frac{1}{3} \sum_j Indeks X_{(i)}$$

Dengan Indeks $X_{(i)}$ = Indeks komponen IPM ke i ;

i = 1 (Indeks angka harapan hidup),

2 (Indeks pendidikan),

3 (Indeks daya beli).

-  Menghitung Reduksi *Shortfall* (r) : digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu.

$$r = \left[\frac{IPM_{t+n} - IPM_t}{100 - IPM_t} \times 100 \right]^{\frac{1}{n}}$$

Dengan:

r = reduksi *shortfall*,

IPM_{t+n} = IPM pada tahun ($t + n$)

IPM_t = IPM pada tahun (t)

2.4 Besaran Skala IPM

IPM suatu wilayah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Keempat kelompok itu adalah (UNDP, 2009):

-  IPM Sangat Tinggi apabila IPM sama dengan 90,00 atau lebih
-  IPM Tinggi apabila IPM antara 80,00 – 89,99
-  IPM Menengah apabila IPM antara 50,00 – 79,99
-  IPM Rendah apabila IPM kurang dari 50,00

BAB III

KONDISI UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT 2009

3.1 Kependudukan

Dalam proses pembangunan, penduduk merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat dimanfaatkan tanpa adanya peranan dari manusia. Dengan adanya manusia, sumber daya alam tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga secara berkelanjutan. Besarnya peran penduduk tersebut maka pemerintah dalam menangani masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan pada upaya pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan kearah perbaikan kualitas sumber daya manusia.

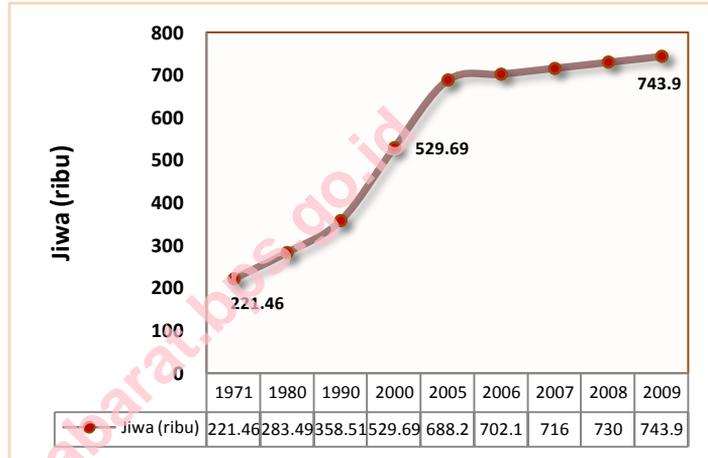
Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi beban yang akan sulit untuk diselesaikan bila kualitasnya rendah. Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah pembangunan manusia yang berkualitas.

Diperlukan peranan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan dengan berorientasi pada pembangunan berbasis kependudukan. Berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan masyarakat luas dengan mempertimbangkan indikator-indikator demografi dan kependudukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk

yang cepat. Sebagai provinsi yang tergolong baru di Indonesia, Papua Barat adalah salah satu dari 33 provinsi yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Gambar 3.1

Perkembangan Jumlah Penduduk Papua Barat 1971-2009

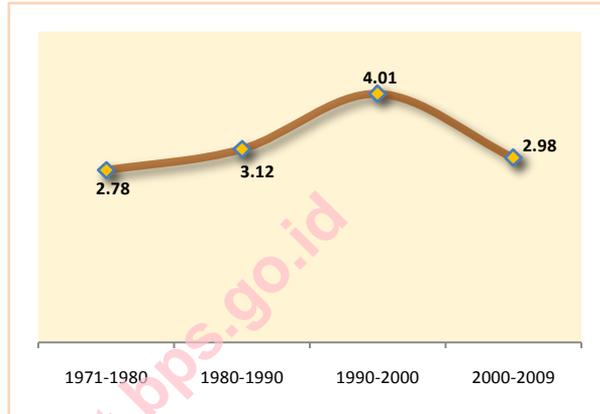


Berdasarkan angka proyeksi dengan menggunakan data dasar dari Survei Penduduk Antar Sensus 2005 (SUPAS05) jumlah penduduk Provinsi Papua Barat pada tahun 2009 mencapai 743.860 jiwa. Dibandingkan dengan pada waktu pertama kali diadakan Sensus Penduduk tahun 1971, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat yang saat itu masih terintegrasi dengan Provinsi Papua berjumlah 221,4 ribu jiwa. perubahan penduduk yang relatif cepat terjadi antara tahun 1990-2000 dan tahun 2000-2005. Penduduk Provinsi Papua Barat terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 529,69 ribu jiwa pada kondisi Sensus Penduduk tahun 2000. Pada saat pendataan SUPAS 2005 penduduk Papua Barat telah mencapai 688,2 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2007

dan 2008 jumlah penduduk Papua Barat menjadi 716 ribu dan 730 ribu jiwa.

Gambar 3.2

Laju Pertumbuhan Penduduk Papua Barat 1971-2009



Pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun Papua Barat berada pada kisaran 2-4 persen. Selama tahun 1971-2008 Papua Barat mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,33 persen. Sementara pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun antar Sensus Penduduk 1971-1980, 1980-1990, dan 1990-2000 sebesar 2,78; 3,12; dan 4,01 persen. Pertumbuhan penduduk mulai mengalami kecenderungan melambat setelah tahun 2000. Pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk 2000 hingga kondisi tahun 2009 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,98 persen.

Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini terjadi mengingat Papua Barat adalah sebuah provinsi yang tergolong muda dan sedang membangun. Diperkirakan masih tingginya angka pertumbuhan penduduk ini berasal dari faktor migrasi. Namun pertumbuhan penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh faktor migrasi saja tetapi juga faktor fertilitas dan

mortalitas. Dengan semakin baiknya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini berangsur-angsur mulai mengalami penurunan seiring dengan menurunnya tingkat fertilitas.

Meskipun pertumbuhan penduduk tergolong cepat, namun Provinsi Papua Barat memiliki sebaran penduduk yang tidak merata dilihat dari luas wilayah. Jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong yaitu sebesar 176.847 jiwa dan 172.558 jiwa atau sekitar 23,8 dan 23,2 persen dari total penduduk Provinsi Papua Barat. Sementara jumlah penduduk paling kecil adalah Kabupaten Teluk Wondama sebesar 23.569 jiwa atau hanya 3,2 persen dari total penduduk Papua Barat.

Menurut luas wilayah, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki luas wilayah terbesar di Provinsi Papua Barat, yaitu 20.840,83 Km², namun kepadatan penduduknya hanya tiga jiwa/Km², demikian pula dengan Kabupaten Kaimana, luas wilayahnya terbesar kedua di Papua Barat, namun kepadatan penduduknya hanya tiga jiwa per Km². Sementara Kota Sorong yang luas wilayahnya paling kecil diantara kabupaten lainnya justru memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi, yaitu 263 penduduk/Km². Padatnya penduduk Kota Sorong tak lepas dari motif ekonomi yang menjadi daya tariknya. Perusahaan minyak yang telah didirikan pada zaman Pemerintahan Belanda membuat daerah ini lebih maju dan memberikan daya tarik yang lebih dibandingkan dengan daerah lainnya di Papua Barat.

Berbeda dengan Kota Sorong, Kabupaten Manokwari adalah kota tua yang awalnya sulit untuk berkembang. Namun setelah Provinsi Papua Barat melepaskan diri dari provinsi induknya, Provinsi Papua, dan

dijadikannya Kabupaten Manokwari sebagai ibukota provinsi, wilayah ini menjadi daerah 'baru' yang mulai ramai. Sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari mulai menata diri dan mulai berkembang menjadi daerah yang ramai dan padat penduduknya.

Secara agregat Provinsi Papua Barat yang memiliki luas wilayah 97.024,27 Km² dan jumlah penduduk 743.860 jiwa pada tahun 2009 tergolong sebagai provinsi yang kepadatan penduduknya termasuk rendah, yakni hanya 8 jiwa/Km². Besaran tersebut mempunyai makna rata-rata hanya terdapat 8 orang penduduk dalam setiap Km².

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk, Persentase Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk/Km² Papua Barat Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (**)	Persentase Jumlah Penduduk	Luas Wilayah *)	Kepadatan Penduduk/Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	68 116	9.2	11 036,48	6
Kaimana	42 810	5.8	16 241,84	3
Teluk Wondama	23 569	3.2	3 959,53	6
Teluk Bintuni	55 805	7.5	20 840,83	3
Manokwari	176 847	23.8	14 250,94	12
Sorong Selatan	62 583	8.4	9 408,63	7
Sorong	99 712	13.4	12 594,94	8
Raja Ampat	41 860	5.6	8 034,44	5
Kota Sorong	172 558	23.2	656,64	263
Papua Barat	743 860	100.0	97 024,27	8

Sumber: *) Berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 2008

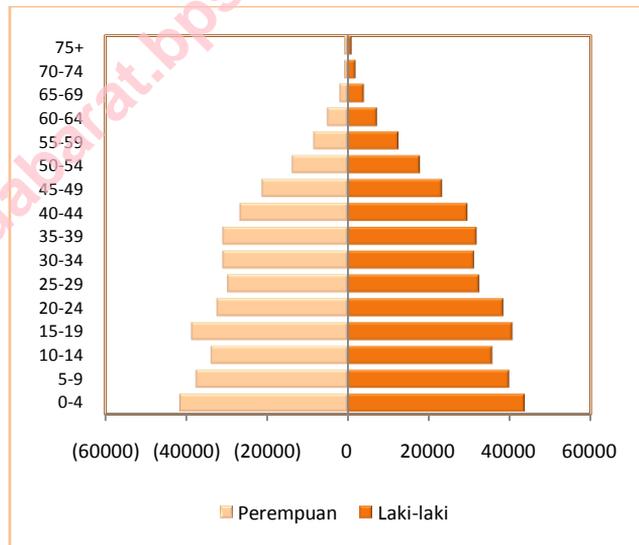
**) Proyeksi Penduduk Papua Barat 2005-2015

Struktur penduduk Provinsi Papua Barat dapat diketahui dari komposisi penduduk menurut kelompok umur. Dalam Gambar 3.3,

piramida penduduk menggambarkan struktur penduduk yang dibagi ke dalam kelompok umur. Dari komposisi sebaran penduduk menurut kelompok umur tersebut Provinsi Papua Barat termasuk sebagai struktur penduduk muda. Hal ini tampak dari bentuk piramida penduduk dimana penduduk lebih terdistribusi ke dalam kelompok umur muda atau terjadi pelebaran pada alas piramida penduduk. Selain itu dilihat dari besarnya median umur, Provinsi Papua Barat tergolong pada penduduk usia muda karena memiliki median umur 19,03 tahun. Sedangkan kriteria penduduk usia muda adalah bila median umur di suatu daerah ≤ 20 tahun.

Gambar 3.3

Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat 2009

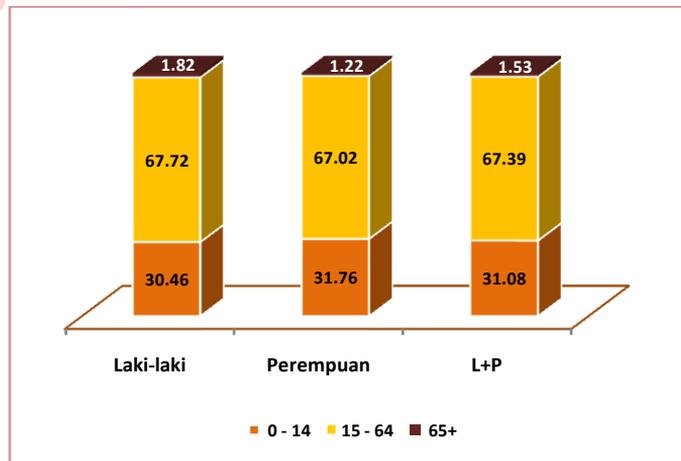


Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan

(*dependency ratio*). Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumahtangga dan melakukan kegiatan lainnya). Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

Gambar 3.4

Persentase Penduduk Menurut Kelompok *Dependency Ratio* Provinsi Papua Barat Tahun 2009



Salah satu implikasi lain dari struktur umur muda adalah tingkat beban ketergantungan yang tinggi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk menanggung hidup penduduk yang belum produktif dan tidak lagi produktif. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak lagi produktif.

Gambar 3.4 memberikan informasi bahwa persentase penduduk produktif dan non produktif baik itu secara agregat maupun gender menunjukkan kecenderungan yang sama. Baik itu penduduk laki-laki maupun perempuan serta total penduduk menunjukkan distribusi yang hampir sama. Besarnya rasio ketergantungan Papua Barat mencapai 48,39 persen. Artinya dari 100 orang yang masih produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban hidup sekitar 48 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun keatas).

3.2 Kondisi Kesehatan

Perhatian pemerintah dalam membangun indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan, diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi sebuah indikator yang layak untuk dievaluasi. Disamping itu, indikator lainnya yang dapat digunakan

sebagai tolok ukur pembangunan manusia dalam bidang kesehatan adalah manusia sebagai objek pembangunan itu sendiri. Tingkat kesehatan seseorang dapat dilihat dari sejarah kesehatan yang diruntut dari kondisi kesehatannya sejak lahir, balita, anak-anak hingga dewasa. Sedangkan tingkat kesehatan pada masyarakat secara umum dapat dilihat dari tingkat pesakitan atau jumlah keluhan kesehatan, tingkat kematian bayi, penolong kelahiran bayi, dan lain-lain.

3.2.1 Sarana Kesehatan

a. Fasilitas Kesehatan

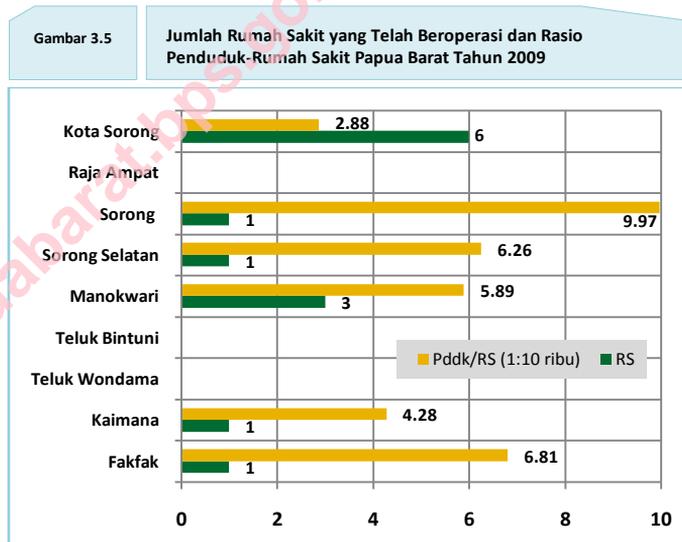
Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan kesehatan antara lain rasio fasilitas kesehatan per penduduk. Fasilitas kesehatan yang dievaluasi antara lain rumah sakit, puskesmas, Pustu, Polindes, dan Poskedes.

▪ Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menyediakan berbagai macam pelayanan kesehatan. Distribusi penyebaran rumah sakit diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Gambar 3.5, ditunjukkan bahwa dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, belum semua kabupaten memiliki fasilitas rumah sakit, seperti di Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Raja Ampat.

Secara kependudukan, Kabupaten Manokwari memiliki jumlah penduduk yang paling banyak pada tahun 2009, namun demikian jumlah rumah sakit yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Dimana rata-rata satu rumah sakit di Kabupaten

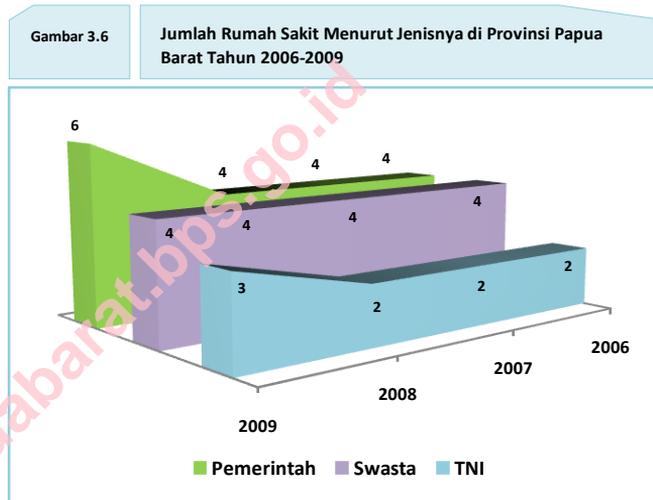
Manokwari melayani sekitar 58,95 ribu penduduk, tidak sebanding dengan Kota Sorong yang memiliki 6 unit rumah sakit tetapi jumlah penduduknya hampir sama dengan Kabupaten Manokwari. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakmerataan distribusi penyebaran rumah sakit di Provinsi Papua Barat. Sehingga penduduk yang berasal dari kabupaten yang tidak memiliki rumah sakit memanfaatkan fasilitas kesehatan yang lain sebagai tempat berobat. Padahal fasilitas kesehatan lainnya tersebut belum tentu sebaik dan selengkap yang dimiliki oleh rumah sakit.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (Data Rumah Sakit)

Jika diamati dari jumlah penduduk, maka dapat dikatakan bahwa 12 rumah sakit di Provinsi Papua Barat melayani 743.860 penduduk. Hal ini juga berarti bahwa 1 rumah sakit melayani sekitar 57.220 penduduk. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi

Papua Barat tahun 2009, ketersediaan rumah sakit milik pemerintah mengalami peningkatan dari 4 rumah sakit di tahun 2006 menjadi 6 unit rumah sakit sedangkan rumah sakit TNI mengalami penambahan dari 2 unit pada tahun 2006 menjadi 3 unit rumah sakit di tahun 2009 (Lihat Gambar 3.6). Rumah sakit swasta dari tahun 2006 hingga 2009 tidak mengalami perubahan dalam segi kuantitas.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (Data Rumah Sakit)

▪ Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes

Selain rumah sakit, sarana kesehatan lainya yang ikut berperan dalam menyehatkan masyarakat antara lain puskesmas, pustu, puskesmas keliling, dan polindes yang dimanfaatkan sebagai fasilitas kesehatan yang terjangkau baik dalam segi biaya maupun letaknya yang menyebar jika dibandingkan dengan rumah sakit. Puskesmas di Provinsi Papua Barat terdistribusi paling banyak di

Kabupaten Manokwari, yaitu 19 puskesmas, sedangkan yang paling sedikit adalah kota Sorong, yaitu 5 buah puskesmas.

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang paling banyak adalah di Kabupaten Manokwari dibandingkan dengan daerah lain, yaitu terdapat 19 puskesmas, 84 Puskesmas Pembantu, 19 puskesmas keliling, dan 74 unit Poliklinik Desa (Polindes).

Tabel 3.2 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes di Provinsi Papua Barat Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Polindes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Fak-Fak	9	37	5	8
Kab. Kaimana	7	46	10	44
Kab. Teluk Wondama	6	22	21	14
Kab. Teluk Bintuni	15	28	10	19
Kab. Manokwari	19	84	19	74
Kab. Sorong Selatan	14	42	26	7
Kab. Sorong	17	22	17	36
Kab. Raja Ampat	13	33	21	16
Kota Sorong	5	25	12	1
Papua Barat	105	339	141	218

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2009

Hal ini berlawanan dengan Kota Sorong, Kota Sorong sebagai kota besar di Provinsi Papua Barat hanya memiliki 5 Puskesmas, 14 Puskesmas Pembantu, dan 6 Polindes. Dilihat dari jumlah penduduk, Kota Sorong memiliki penduduk sebanyak 172.558 penduduk di tahun 2009 yang tidak jauh beda dengan Kabupaten Manokwari yang berjumlah 176.847 jiwa. Sedikitnya fasilitas kesehatan seperti

Puskesmas, Pustu, Posekdes, dan Polindes dikarenakan Kota Sorong memiliki rumah sakit terbanyak sebagai sarana kesehatan yang dipilih oleh masyarakat untuk berobat. Disamping itu penduduk Kota Sorong memiliki sebaran yang terkonsentrasi dalam wilayah yang lebih sempit.

b. Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, hal yang sangat mendukung adalah ketersediaan tenaga kesehatan atau tenaga medis sebagai subjek yang melakukan pengobatan dan penanganan medis. Distribusi tenaga medis di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2009

Kabupaten/Kota	Dokter			Jumlah
	Ahli	Umum	Gigi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	3	27	3	33
Kaimana	-	4	2	6
Teluk Wondama	-	4	-	4
Teluk Bintuni	-	5	2	7
Manokwari	7	32	7	46
Sorong Selatan	-	9	1	10
Sorong	4	5	-	9
Raja Ampat	-	12	1	13
Kota Sorong	7	10	3	20
Papua Barat 2009	21	108	19	148
2008*)	26	27	3	56
2007	25	187	30	282
2006	25	187	30	282

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2009

*) Hanya dokter yang berstatus sebagai PNS

Berdasarkan Tabel 3.3, diketahui bahwa jumlah dokter yang paling banyak ada di Kabupaten Manokwari. Manokwari sebagai ibukota Provinsi memiliki tenaga dokter sebanyak 46 orang dengan rincian 7 dokter ahli, 32 dokter umum, dan 7 dokter gigi. Penyebaran tenaga medis seperti dokter yang tidak memadai di Provinsi Papua Barat, terutama di kabupaten pemekaran menyebabkan pelayanan kesehatan tidak maksimal. Hal itu disebabkan oleh keterjangkauan dalam hal jarak yang ditempuh untuk mendapatkan pelayanan dokter. Terdapat kecenderungan banyaknya ketersediaan dokter tersebar di 'kabupaten/kota tua' yang telah ramai dengan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Sebagai contoh adalah Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong memiliki tenaga dokter yang terbanyak, masing-masing memiliki 33, 46, dan 20 orang dokter. Keterbatasan tenaga medis ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah mengingat kebutuhan akan tenaga dokter sangat diperlukan terutama di kabupaten pemekaran seperti Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Kaimana.

Jumlah dokter dalam suatu wilayah tertentu menentukan tingkat pelayanan kesehatan. Rasio antara jumlah dokter yang tersedia dengan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan haruslah proporsional. Semakin besar rasio penduduk terhadap dokter maka semakin banyak penduduk yang harus dilayani. Implikasinya adalah semakin besar jumlah penduduk yang tidak terlayani atau semakin sulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter. Jika diperhatikan dari jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2009 dan jumlah dokter yang tersedia, maka rasio jumlah penduduk terhadap

jumlah dokter di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 5.026, dengan kata lain satu dokter rata-rata melayani sekitar 5.026 orang.

Tabel 3.4 Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter *)	Rasio Penduduk / Dokter
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	68 116	33	2 064
Kaimana	42 810	6	7 135
Teluk Wondama	23 569	4	5 892
Teluk Bintuni	55 805	7	7 972
Manokwari	176 847	46	3 845
Sorong Selatan	62 583	10	6 258
Sorong	99 712	9	11 079
Raja Ampat	41 860	13	3 220
Kota Sorong	172 558	20	8 628
Papua Barat	743 860	148	5 026

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (*)

Sedangkan jika diamati secara parsial, disparitas jumlah dokter antar kabupaten/kota tidak merata. Disparitas terbesar terjadi di Kabupaten Sorong. Di kabupaten ini seorang dokter harus melayani sekitar 11.079 penduduk. Sementara rasio penduduk-dokter yang terkecil berada di Kabupaten Fakfak. Itu pun seorang dokter di Kabupaten Fakfak rata-rata harus melayani setidaknya 2.064 penduduk. Implikasi lain dari keterbatasan jumlah dokter tersebut adalah masyarakat harus memanfaatkan tenaga medis atau paramedis lainnya sebagai subjek pelaksana penyehatan masyarakat.

3.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat

Selain dari sarana kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dijadikan sebagai indikator untuk melihat indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan mengingat manusia sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Objek yang dijadikan perhatian dalam pembangunan di bidang kesehatan salah satunya adalah kesehatan pada balita. Keberhasilan dalam meningkatkan tingkat kesehatan pada balita dapat dilihat dari tingkat kematian bayi, penolong kelahiran, dan imunisasi pada balita.

Tingkat pesakitan atau banyaknya keluhan kesehatan menunjukkan seberapa besar kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Semakin banyak keluhan kesehatan yang terjadi dalam masyarakat maka tingkat kesehatan masyarakat semakin rendah. Kesehatan pada masyarakat juga dipengaruhi oleh pola hidup sehat yang dijalani. Salah satunya adalah sistem sanitasi dalam masyarakat. Penggunaan air bersih dan sistem pembuangan tinja dianggap sebagai hal yang perlu diperhatikan.

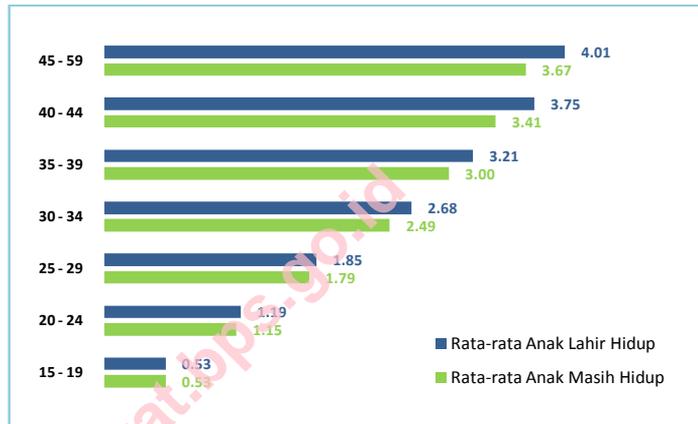
➤ Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dapat didekati dari data jumlah anak yang lahir hidup dengan jumlah anak yang masih hidup. Berdasarkan data Susenas 2009 yaitu data rata-rata anak lahir hidup dengan rata-rata anak masih hidup menunjukkan bahwa angka kematian bayi tertinggi berada pada kelompok usia wanita antara umur 40-44 tahun dan 45-49 tahun. Hal ini dilihat dari selisih rata-rata anak lahir hidup dengan

rata-rata anak masih hidup mempunyai selisih terbesar di antara kelompok umur lainnya yaitu sebesar 0,34 poin.

Gambar 3.7

Rata-rata Anak Lahir Hidup dan Masih Hidup Menurut Kelompok Wanita Usia Subur di Provinsi Papua Barat Tahun 2009



➤ Penolong Kelahiran

Indikator penting terkait dengan kesehatan adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi berpengaruh kepada penghitungan angka harapan hidup waktu lahir (e_0) yang digunakan dalam salah satu dimensi pada indeks komposit penyusun indeks pembangunan manusia ditilik dari sisi kesehatan. Sementara itu salah satu aspek penentu besarnya angka kematian bayi adalah penolong kelahiran. Penolong kelahiran sebenarnya terkait dengan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara keselamatan ibu maupun anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam resiko besar sebuah kelahiran. Penolong

kelahiran yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya selama ini dianggap lebih baik jika dibandingkan dengan dukun atau famili. Dalam analisis ini digunakan penolong kelahiran terakhir mengingat pada penolong kelahiran terakhir terdapat proses kelahiran yang sangat mengandung resiko. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa 42,53 persen penolong kelahiran terakhir balita dilakukan oleh bidan, kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 45,95 persen. Dengan terjadinya penurunan penolong kelahiran dengan menggunakan jasa bidan justru tenaga dukun semakin meningkat dari 25,39 persen pada tahun 2008 menjadi 27,26 persen pada tahun 2009. Penolong kelahiran oleh dokter mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2009 menjadi 12,25 persen dibandingkan tahun 2008. Penolong kelahiran lainnya yaitu berturut-turut 11,20 persen oleh famili; 5,65 persen oleh tenaga medis lain; dan 1,11 persen oleh penolong kelahiran lainnya.

Masih tingginya persentase kelahiran yang ditolong oleh dukun di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa peranan dukun dalam proses kelahiran balita terakhir masih tinggi. Tenaga bidan di Kabupaten Fakfak memiliki peranan terbesar dalam proses kelahiran balita pertama (67,29 %). Sedangkan dukun memiliki peranan terbesar di Kabupaten Raja Ampat dalam penolong kelahiran pertama balita (78,49 %).

Tabel 3.5 Persentase Tenaga Penolong Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2009

Kabupaten/kota	Penolong Waktu Lahir					
	Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lain	Dukun	Famili	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Fakfak	17,53	67,29	0,96	14,21	0,00	0,00
Kab. Kaimana	7,05	35,35	20,36	26,75	10,48	0,00
Kab. Teluk Wondama	10,03	42,24	3,38	22,85	20,83	0,68
Kab. Teluk Bintuni	6,60	24,29	11,75	35,93	19,22	2,21
Kab. Manokwari	18,23	46,44	0,42	12,14	21,11	1,65
Kab. Sorong Selatan	0,88	28,94	21,06	30,71	18,42	0,00
Kab. Sorong	5,38	43,04	2,16	39,75	6,46	3,22
Kab. Raja Ampat	1,08	16,13	2,16	78,49	2,14	0,00
Kota Sorong	20,77	50,04	2,94	22,52	3,31	0,42
Papua Barat 2009	12,25	42,53	5,65	27,26	11,20	1,11
Papua Barat 2008	7,74	45,95	2,60	25,39	17,25	1,07

Sumber : Susenas 2009

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa baik penolong kelahiran pertama maupun terakhir di Papua Barat di dominasi oleh bidan. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan bidan memiliki peranan terbesar di Papua Barat dalam menolong kelahiran bayi. Sedangkan dukun masih memiliki peran besar dalam proses penolong kelahiran berada pada posisi kedua setelah bidan.

➤ **Imunisasi**

Setelah melihat angka kematian pada bayi di Provinsi Papua Barat, kesehatan balita juga dapat dilihat dari imunisasi. Imunisasi dirasa sangat perlu dalam menjaga kekebalan pada tubuh balita dari berbagai macam penyakit. Imunisasi yang diberikan pada balita diantaranya adalah imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan

Hepatitis B. Pemberian imunisasi sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya sakit atau terserang penyakit. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa persentase balita yang mendapatkan imunisasi cukup tinggi untuk semua jenis imunisasi yaitu 88,56 persen BCG; 87,29 persen DPT; 87,52 persen Polio; 77,29 persen campak/Morbili; dan sebanyak 80,16 persen imunisasi Hepatitis B.

Tabel 3.6 Persentase Penggunaan Imunisasi Pada Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009

Kabupaten/kota	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak/ Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Fakfak	99,04	99,14	94,44	88,68	94,44
Kab. Kaimana	98,72	97,44	95,20	85,05	87,60
Kab. Teluk Wondama	85,21	81,13	81,13	68,40	63,10
Kab. Teluk Bintuni	99,26	97,81	98,40	88,72	95,59
Kab. Manokwari	69,76	69,71	72,66	59,28	59,74
Kab. Sorong Selatan	93,86	89,46	91,22	80,68	83,31
Kab. Sorong	92,48	91,40	90,32	81,72	75,29
Kab. Raja Ampat	81,78	80,70	80,70	76,39	79,61
Kota Sorong	93,31	92,06	92,48	81,15	91,22
Prov. Papua Barat	88,56	87,29	87,52	77,29	80,16

Sumber: Susenas 2009

Komposisi persentase penggunaan imunisasi pada balita tertinggi untuk hampir semua jenis imunisasi berada di Kabupaten Teluk Bintuni kecuali jenis imunisasi DPT dengan rincian jenis imunisasi BCG sebesar 99,26 persen; Polio 98,40 persen; jenis imunisasi campak/morbili 88,72 persen; dan imunisasi hepatitis B

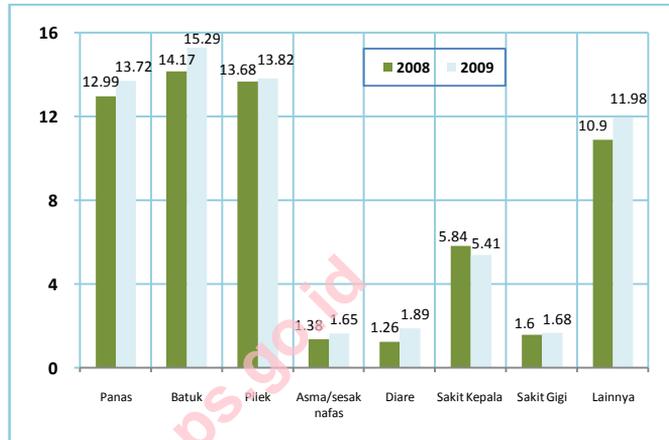
sebesar 95,59 persen. Sementara penggunaan tertinggi jenis imunisasi DPT berada di Kabupaten Fakfak sebesar 99,14 persen. Sedangkan penggunaan imunisasi terendah seluruhnya berada di Kabupaten Manokwari dengan rincian: jenis imunisasi BCG (69,76 %); imunisasi DPT (69,71 %); imunisasi Polio (72,66 %); imunisasi Campak (59,28 %); dan Hepatitis B (59,74 %).

➤ **Morbiditas/ Tingkat Pesakitan**

Banyaknya keluhan kesehatan digunakan untuk mengukur derajat kesehatan pada masyarakat. Masyarakat dianggap memiliki derajat kesehatan yang semakin tinggi ketika keluhan kesehatan yang dialami semakin sedikit. Gambar 3.8 menunjukkan bahwa tiga keluhan kesehatan utama yang paling banyak dialami oleh penduduk di Papua Barat dalam dua tahun terakhir adalah batuk, pilek dan panas. Seperti halnya di tahun 2008, di tahun 2009 keluhan batuk adalah yang paling dirasakan oleh masyarakat. Keluhan ini meningkat menjadi 15,29 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar 14,17 persen. Keluhan terbanyak kedua adalah pilek yaitu sebesar 13,82 persen atau meningkat dari kondisi 2008 sebesar 13,68 persen. Keluhan terbanyak ketiga adalah panas. keluhan penyakit ini meningkat dari 12,99 persen menjadi 13,72 persen di tahun 2009.

Gambar 3.8

Persentase Tingkat Keluhan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2009



berdasarkan tiga keluhan yang paling banyak dirasakan, dua keluhan kesehatan seperti panas dan batuk paling banyak dikeluhkan oleh penduduk Kabupaten Teluk Wondama, yaitu sebesar 23,15 persen dan 24,76 persen. Sementara keluhan kesehatan jenis pilek paling banyak dirasakan oleh penduduk di Kabupaten Manokwari, yaitu sebesar 21,42 persen (lihat Tabel 3.7). Keluhan kesehatan pada jenis penyakit asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan sakit lainnya masing-masing sebesar 1,65 persen; 1,89 persen; 5,41 persen; dan 1,68 persen. Secara umum keluhan kesehatan hampir seluruhnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2008. Hal ini dapat memberikan informasi bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu dibutuhkan fasilitas dan tenaga

kesehatan yang memadai dan terjangkau oleh segala lapisan masyarakat agar kondisi kesehatan mereka dapat meningkat.

Tabel 3.7 Persentase Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Panas	Batuk	Pilek	Asma/ sesak nafas	Diare	Sakit Kepala Berulang	Sakit Gigi	Lainnya	Keluhan Kesehat- an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Fakfak	6.13	7.14	8.65	0.58	0.45	2.68	0.47	1.68	13.86
Kaimana	5.56	10.68	5.30	0.76	2.06	3.11	0.61	1.20	17.64
Teluk Wondama	23.15	24.76	20.84	2.07	2.67	17.25	0.94	6.67	38.84
Teluk Bintuni	12.24	12.32	11.35	1.35	2.33	9.65	1.63	24.03	45.71
Manokwari	22.26	21.86	21.42	2.70	1.66	5.31	1.83	22.37	40.89
Sorong Selatan	10.19	17.28	12.73	0.24	1.18	1.80	3.13	5.43	27.60
Sorong	11.71	16.09	15.64	2.24	1.27	6.05	1.18	7.71	28.70
Raja Ampat	9.74	9.98	6.55	1.59	0.98	2.46	0.74	2.56	16.61
Kota Sorong	12.59	12.71	11.14	1.44	3.25	5.84	2.39	12.00	27.62
Papua Barat	13.72	15.29	13.82	1.65	1.89	5.41	1.68	11.98	30.18

Sumber data: Susenas 2009

Informasi mengenai keluhan kesehatan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyediaan pelayanan kesehatan seperti persediaan obat-obatan dan tenaga medis maupun paramedis. Tingkat pesakit juga dapat dilihat dari informasi mengenai lama sakit penduduk. Menurut data Susenas 2009 (lampiran 5), sebanyak 58,39 persen penduduk Papua Barat lama sakit kurang dari 3 hari; 38,89 persen lama sakit 4-7 hari; dan sisanya sebanyak 7,18 persen lama sakit lebih dari 7 hari. Kabupaten Sorong Selatan memiliki persentase penduduk terbesar yang mengalami sakit kurang dari 3 hari (73,47%) dan Kabupaten Teluk Wondama memiliki persentase

terkecil (31,84%). Sementara untuk lama sakit antara 4-7 hari persentase tertinggi adalah Kabupaten Teluk Wondama yaitu sebesar 54,94 persen dan persentase terendah adalah Kabupaten Teluk Bintuni yaitu sebesar 21,83 persen. Lama sakit lebih dari 7 hari tertinggi berada di Kabupaten Teluk Wondama (13,22%) dan terendah di Kabupaten Kaimana (1,10%).

Berdasarkan Data Susenas 2009 (lampiran 6) menunjukkan bahwa sebanyak 64,15 persen penduduk di Provinsi Papua Barat melakukan pengobatan sendiri ketika menderita keluhan sakit yaitu dilakukan dengan tiga macam yaitu pengobatan tradisional, modem, dan lainnya. Sementara 35,85 persen lainnya melakukan pengobatan ke sarana kesehatan jika mengalami keluhan kesehatan.

➤ **Penggunaan Air Bersih**

Selain dilihat dari tingkat pesakitan, derajat kesehatan masyarakat juga dapat diamati dari pola hidup. Pola hidup mempengaruhi tingkat kesehatan. Pola hidup yang bersih dan sehat tentunya lebih dapat menjamin kesehatan jika dibandingkan dengan pola hidup yang tidak bersih. Penggunaan air bersih baik itu sumber air minum maupun yang lainnya menentukan kondisi kesehatan seseorang. Karena sumber air minum menentukan kualitas air minum. Hasil Susenas 2009 menunjukkan bahwa sebesar 46,65 persen rumah tangga di Papua Barat memiliki fasilitas air minum sendiri; 23,95 persen milik bersama; 18,61 persen milik umum, dan 10,79 persen tidak ada fasilitas air minum (lihat Gambar 3.9).

Gambar 3.9

Persentase Penggunaan Fasilitas Air Bersih Provinsi Papua Barat Tahun 2009


Kabupaten Sorong Selatan menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Papua Barat sebagai kabupaten yang rumah tangganya tidak ada fasilitas air minum (41,82%). Rumah tangga di Kabupaten Fakfak kebanyakan memiliki fasilitas air minum sendiri (64,08%), sedangkan Kabupaten Raja Ampat adalah yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya yang rumah tangganya memiliki fasilitas air minum sendiri yaitu sebesar 4,68 persen.

Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas air minum sendiri di Papua Barat hanya sebesar 46,65 persen menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang masih menggunakan fasilitas air minum bersama, umum, maupun fasilitas air minum lainnya (lihat Tabel 3.8).

Tabel 3.8 Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009

Kabupaten/kota	Fasilitas Air Minum				Jumlah
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Fakfak	64.08	11.73	9.90	14.29	100.00
Kab. Kaimana	24.41	31.20	31.34	13.05	100.00
Kab. Teluk Wondama	15.03	45.59	35.17	4.21	100.00
Kab. Teluk Bintuni	63.21	21.62	11.65	3.51	100.00
Kab. Manokwari	48.68	20.70	17.52	5.10	100.00
Kab. Sorong Selatan	49.19	3.17	5.82	41.82	100.00
Kab. Sorong	48.91	20.65	17.40	13.04	100.00
Kab. Raja Ampat	4.68	44.79	50.53	0.00	100.00
Kota Sorong	55.30	25.27	16.52	2.91	100.00
Prov. Papua Barat	46.65	23.95	18.61	10.79	100.00

Sumber: Susenas, 2009

➤ Penggunaan Pembuangan Tinja

Selain fasilitas air minum, sanitasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Hal yang sangat penting adalah penggunaan pembuangan tinja, dimana tinja sebagai kotoran manusia harus memiliki tempat pembuangan tersendiri. Berdasarkan data pada Tabel 3.9 menunjukkan bahwa sebanyak 17,16 persen dari semua rumah tangga di Papua Barat tidak ada atau tidak memiliki tempat pembuangan tinja. Sedangkan yang lainnya yaitu sebesar 59,49 persen memiliki fasilitas pembuangan air besar sendiri; 12,37 persen milik bersama; dan 10,98 persen milik umum. Masih tingginya persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan sistem sanitasi di Provinsi Papua Barat. Kabupaten

Kaimana dan Kabupaten Raja Ampat mempunyai persentase yang sangat rendah pada fasilitas tempat buang air besar sendiri yaitu masing-masing sebesar 19,96 persen dan 13,56 persen. Pada Kabupaten Kaimana bahkan yang tidak memiliki fasilitas buang air besar mencapai 30,04 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang sebagian besar rumah tangganya telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri adalah Kota Sorong (82,58%), Kabupaten Teluk Bintuni (77,87%), Kabupaten Fakfak (65,83%), dan Kabupaten Sorong Selatan (58,31%).

Tabel 3.9 Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009

Kabupaten/kota	Fasilitas Tempat Buang Air Besar				Total
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Fakfak	65.83	10.56	11.16	12.44	100,00
Kab. Kaimana	19.96	13.98	36.03	30.04	100,00
Kab. Teluk Wondama	24.73	31.14	19.25	24.88	100,00
Kab. Teluk Bintuni	77.87	7.40	5.62	9.10	100,00
Kab. Manokwari	57.58	15.41	4.06	22.96	100,00
Kab. Sorong Selatan	58.31	4.18	7.82	29.69	100,00
Kab. Sorong	55.72	10.94	12.50	20.83	100,00
Kab. Raja Ampat	13.56	20.82	49.97	15.65	100,00
Kota Sorong	82.58	9.97	3.92	3.53	100,00
Papua Barat 2009	59.49	12.37	10.98	17.16	100,00
Papua Barat 2008	49,52	19,29	11,56	19,63	100,00

Sumber: Susenas, 2009

Menurut tempat pembuangan akhir tinja, sebanyak 55,09 persen rumah tangga di Papua Barat menggunakan tangki/spal sebagai tempat pembuangan akhir tinja; 0,91 persen kolam/sawah; 11,69 persen sungai/danau/laut; 24,01 persen lobang tanah; 7,87

persen pantai/tanah lapang/kebun, dan 0,43 persen pada tempat pembuangan lainnya. Beberapa kabupaten masih memiliki persentase yang cukup tinggi pada tempat pembuangan akhir tinja di lobang tanah, yaitu Kabupaten Sorong Selatan (41,12%); Kabupaten Teluk Bintuni (37,85%); Kabupaten Raja Ampat (36,41%); Kabupaten Kaimana (35,09%); dan Kabupaten Sorong (33,86%).

Sanitasi yang baik dan sehat dalam hal pembuangan akhir tinja adalah dengan menggunakan tangki septic/SPAL. Di Papua Barat baru empat kabupaten/kota yang telah menggunakan tangki septic/SPAL diatas 50 persen, yaitu Kota Sorong (91,22%); Kabupaten Manokwari (57,45%); Kabupaten Teluk Wondama (55,52%); dan Kabupaten Fakfak (50,40%).

3.3 Kondisi Pendidikan

Dalam pembukaan UUD 1945 telah diamanahkan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia sebuah pesan penting terkait dengan kemajuan bangsa Indonesia. Pesan yang terkandung dalam tujuan bangsa Indonesia itu ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan sebuah perjuangan dan usaha melalui kegiatan pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 juga telah jelas mengaturnya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selain itu lebih khusus dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab IV Bagian 1 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Kedua ayat ini secara jelas memberikan kesempatan yang sama

kepada semua pihak untuk mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya.

Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Diantaranya adalah dengan menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Maksud dan tujuan pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

Selanjutnya dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 6 disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (pasal 17 UU Sisdiknas 2003).

Upaya mempercepat tercapainya gerakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun terus dilakukan. Pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (PWPPBA). Berbagai lini institusi terkait dilibatkan dalam upaya gerakan pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara.

Target yang ingin dicapai dalam Inpres No. 5 tahun 2006 antara lain adalah:

- a. Meningkatkan persentase peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau Angka Partisipasi Murni sekurang-kurangnya menjadi 95 persen pada akhir tahun 2008.
- b. Meningkatkan persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau Angka Partisipasi Kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 persen pada akhir tahun 2008.
- c. Menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas atau sekurang-kurangnya menjadi 5 persen pada akhir tahun 2009.

Pemerintah juga telah melakukan sebuah langkah konkret dalam upaya mensukseskan pendidikan di Indonesia dengan mencantumkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang dicantumkan dalam amanat konstitusi amandemen UUD 1945 yang kemudian ditegaskan lagi dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1) bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Suatu angka yang fantastik yang sebelumnya angka tersebut tidak pernah lebih dari lima persen. Meskipun telah di-Undang-undangkan dari tahun 2003 namun sampai tahun 2008 realisasi untuk menganggarkan jumlah minimal 20 persen dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara belum tercapai, walaupun begitu besarnya anggaran berangsur-angsur telah mendekati target. Dan kemungkinan di tahun 2009, rencana

menganggarkan 20 persen dari total anggaran untuk keperluan pembiayaan pendidikan akan dapat tercapai.

Langkah-langkah tersebut diatas merupakan semata-mata dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan dalam upaya untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

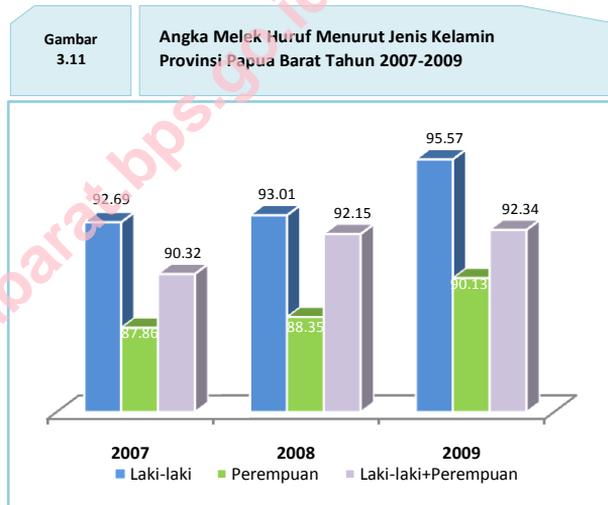
3.3.1 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan adalah angka melek huruf. Angka melek huruf mengindikasikan kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis. Bagaimanapun juga kemampuan dasar pertama kali yang dimiliki seseorang untuk dapat menambah dan mengasah ilmu pengetahuan adalah dengan membaca dan menulis. Dalam hal ini angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Angka melek huruf Provinsi Papua Barat tahun 2009 adalah sebesar 92,34 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2006 dan 2007 yaitu sebesar 90,32 persen dan 90,15 persen. Semakin tinggi angka melek huruf maka kenaikan persentase angka melek huruf ini akan cenderung semakin lambat. Dalam artian pertumbuhan angka melek hurufnya semakin kecil atau mengalami perlambatan. Angka melek huruf menurut jenis kelamin menunjukkan kecenderungan bahwa penduduk laki-laki mempunyai angka melek huruf yang lebih baik dari pada angka melek huruf penduduk perempuan pada tahun 2007-2009. Hal ini menggambarkan belum

adanya kesetaraan gender dalam hal kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya di Provinsi Papua Barat.

Angka melek huruf penduduk laki-laki tahun 2008 sebesar 93,01 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2007 yaitu sebesar 92,69 persen. Angka melek huruf penduduk laki-laki kembali mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi 95,57 persen terhadap tahun 2008, atau mengalami peningkatan sebesar 2,56 persen.



Angka melek huruf perempuan walaupun selalu lebih rendah dari angka melek huruf penduduk laki-laki juga menunjukkan tren peningkatan yang serupa dengan penduduk laki-laki. Angka melek huruf perempuan mengalami peningkatan menjadi 90,13 persen di tahun 2009 dibandingkan tahun 2007 dan 2008 yang masing-masing besarnya 87,86 persen dan 88,35 persen.

Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia angka melek huruf digunakan sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di bidang pendidikan bersama dengan indikator rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf ini mempunyai bobot dua kali lebih besar dari indikator rata-rata lama sekolah.

Sebaran kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya menurut kabupaten/kota dan angka buta huruf dapat dilihat pada Tabel 3.10. Secara agregat, kemampuan membaca huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya berturut-turut adalah 73,92 persen; 10,18 persen; dan 2,82 persen. Kemampuan penduduk membaca huruf latin tertinggi berada di Kabupaten Sorong Selatan yakni sebesar 81,71 persen dan yang terendah berada di Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 53,07 persen.

Angka buta huruf diperoleh dari banyaknya penduduk berusia 10 tahun keatas yang tidak mampu membaca huruf latin dan atau huruf lainnya dibagi dengan jumlah penduduk usia 10 tahun keatas atau seratus persen jumlah penduduk dikurangi dengan persentase angka melek huruf maka diperoleh angka buta huruf. Pada angka buta huruf batasan umur yang digunakan juga penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Namun angka buta huruf juga dapat dihitung untuk penduduk diatas 15 tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Angka buta huruf tertinggi terjadi di Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Sorong yaitu sebesar 20,93 persen dan 18,02 persen. Sementara angka buta huruf terendah berada di Kota Sorong yaitu sebesar 1,18 persen.

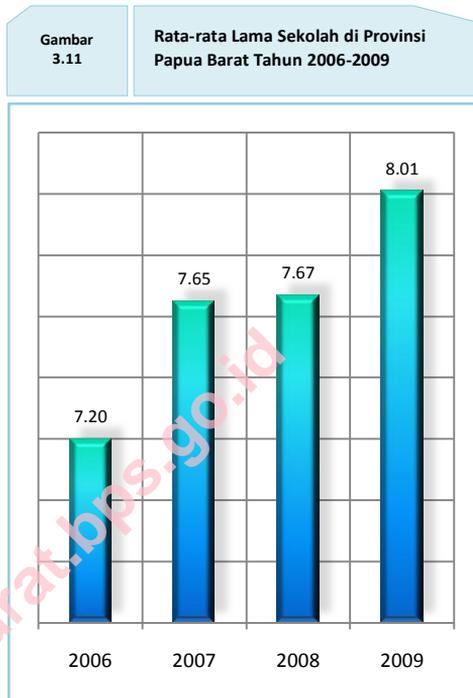
Tabel 3.10 Persentase Kemampuan Penduduk Usia 10 Tahun Keatas membaca Huruf Latin, Huruf Arab, Huruf Linnya dan Angka Buta Huruf Provinsi Papua Barat Tahun 2009

Kabupaten/kota	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Fakfak	61.58	27.25	2.53	8.64
Kab. Kaimana	78.03	11.72	0.19	10.07
Kab. Teluk Wondama	69.80	1.51	7.75	20.93
Kab. Teluk Bintuni	53.07	25.14	4.89	16.89
Kab. Manokwari	74.43	7.12	1.84	16.61
Kab. Sorong Selatan	81.71	1.68	0.00	16.62
Kab. Sorong	74.76	3.11	4.11	18.02
Kab. Raja Ampat	75.03	6.68	6.51	11.79
Kota Sorong	80.75	10.64	2.66	5.95
Prov. Papua Barat	73.92	10.18	2.82	13.08

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2009

3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menunjukkan kemampuan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun keatas. Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia indikator ini merupakan salah satu parameter untuk mengukur indeks pendidikan bersama-sama dengan angka melek huruf.



Berdasarkan Gambar 3.11, rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 8,01 tahun atau mengalami peningkatan dari tahun 2007 dan 2008 yakni sebesar 7,65 tahun dan 7,67 tahun.

Rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat tahun 2009 sebesar 8,01 artinya rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 2 SLTP atau putus sekolah di kelas 3 SLTP.

3.3.3 Angka Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang biasa disebut dengan angka partisipasi sekolah (APS). Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dibidang pembangunan, khususnya berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

APS penduduk usia 7-12 tahun mengalami peningkatan dari 92,64 persen di tahun 2007 menjadi 93,18 persen di tahun 2008. APS pada usia ini kembali meningkat menjadi 93,35 persen di tahun 2009. Kondisi yang sama terjadi pada penduduk usia 13-15 tahun. Pada kondisi ini APS juga mengalami peningkatan dari tahun 2007 ke tahun 2008 yaitu dari 87,58 persen menjadi 88,75 persen. Namun di tahun 2009 APS di usia ini mengalami penurunan tipis menjadi 88,59 persen. Hal yang berbeda terjadi pada APS penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun, kedua kelompok umur ini justru mengalami penurunan APS dan mempunyai kesamaan pola perkembangan. APS Penduduk usia 16-18 mengalami penurunan dari 57,84 persen di tahun 2007 menjadi 57,53 persen di tahun 2008. Kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2009 menjadi 57,95 persen. Dan APS penduduk usia 19-24 tahun mengalami penurunan dari 14,46 persen di tahun 2007 menjadi 12,25 persen di tahun 2008, kemudian juga mengalami peningkatan menjadi 12,72 persen di tahun 2009.

Peningkatan APS penduduk usia 7-12, 16-18 dan 19-24 mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk untuk bersekolah

SD/MI, SLTA/MA dan perguruan tinggi mengalami peningkatan. Sedangkan penurunan APS penduduk usia 13-15 menunjukkan partisipasi penduduk untuk bersekolah SLTP/MTs atau sederajat mengalami penurunan.

Gambar
3.12

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur
di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009



APS penduduk usia 7-12 tahun mencapai 93,35 persen berarti masih ada sekitar 6,65 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak dapat mengenyam pendidikan atau putus sekolah. Demikian pula pada penduduk usia 13-15 dan 16-18 persen, terdapat 11,41 persen dan 42,05 persen pada kelompok umur tersebut yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Sementara pada

penduduk usia 19-24 hanya 12,72 persen saja yang melanjutkan sekolah.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar penduduk yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu pada interval usia di tingkat sekolah tersebut.

Tabel 3.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2007-2009

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI	SLTP/MTs	SMU/MA	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	120,04	54,63	67,64	13,46
Kaimana	118,07	46,11	54,80	0,00
Teluk Wondama	127,47	56,54	38,10	1,89
Teluk Bintuni	116,41	76,48	31,76	2,25
Manokwari	113,71	80,05	78,68	13,70
Sorong Selatan	114,19	48,88	30,90	5,10
Sorong	114,67	43,18	58,49	2,73
Raja Ampat	138,59	45,14	89,12	1,17
Kota Sorong	117,17	87,26	58,76	10,47
Papua Barat (2009)	117,50	66,29	62,04	8,41
Papua Barat (2008)	112,68	89,99	57,25	9,73
Papua Barat (2007)	116,05	70,10	60,78	7,71

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2007-2009

Secara agregat, terjadi peningkatan APK tahun 2009 pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMU/MA serta terjadi penurunan APK pada jenjang pendidikan SLTP/MTs dan perguruan tinggi dibandingkan dengan tahun 2008. APK SD tahun 2008 sebesar 117,50 persen artinya terdapat penduduk diluar usia sekolah SD/MI (7-12 tahun) yang telah/masih bersekolah SD/MI karena APK berada diatas 100 persen. Dan menurut data Susenas 2009, APK SD/MI seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat berada diatas 100 persen. APK SD/MI tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu dari 112,68 persen menjadi 117,50 persen. APK SD/MI Kabupaten Raja Ampat adalah APK tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua Barat yakni sebesar 138,59 persen. APK SD/MI terendah berada pada Kabupaten Manokwari sebesar 113,71 persen.

APK SLTP/MTs Papua Barat tahun 2008 sebesar 89,99 persen mengalami penurunan menjadi 66,29 persen pada tahun 2009. APK SLTP/MTs sebesar 66,29 persen mengandung arti banyaknya penduduk yang sedang bersekolah di SLTP/MTs diantara penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 66,29 persen. Distribusi APK SLTP/MTs menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kota Sorong memiliki APK yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yakni sebesar 87,26 persen, sementara Kabupaten Sorong merupakan daerah dengan APK SLTP/MTs terendah yaitu sebesar 43,18 persen. Diduga rendahnya APK SLTP/MTs di Kabupaten Sorong terjadi karena tidak semua kecamatan memiliki sekolah SLTP/MTs sehingga diperkirakan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut bersekolah

ke Kota Sorong. Kondisi ini sejalan dengan tingginya APK SLTP/MTs di Kota Sorong.

Tabel 3.12 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2007-2009

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	91.94	47.22	44.03	11.38
Kaimana	96.71	31.05	33.67	0,00
Teluk Wondama	88,07	20.35	31.16	1.89
Teluk Bintuni	94.73	49.33	28.83	2.25
Manokwari	88.40	55.16	56.74	8.88
Sorong Selatan	90.78	22.22	27.27	5.10
Sorong	88.79	36.37	43.86	2.73
Raja Ampat	93.40	35.44	52.70	1.17
Kota Sorong	93.10	73.85	38.82	7.71
Papua Barat (2009)	91.25	49.03	43.55	6.25
Papua Barat (2008)	90,71	48,92	43,61	6,06
Papua Barat (2007)	89,97	52,32	44,80	7,36

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2007-2009

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM dibagi menjadi kelompok APM SD untuk penduduk yang berusia 7-12 tahun, APM SLTP untuk penduduk yang berusia 13-15 tahun dan APM SLTA untuk penduduk

yang berusia 16-18 tahun serta APM perguruan tinggi untuk penduduk yang berusia 19-24 tahun.

Angka partisipasi murni Provinsi Papua Barat tahun 2009 yang mengalami peningkatan di semua level pendidikan dibandingkan tahun 2008 kecuali pada jenjang pendidikan SLTA/MA yang mengalami sedikit penurunan. APM SD/MI meningkat menjadi 91,25 persen pada tahun 2009 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 90,71 persen. APM SD/MI sebesar 91,25 persen mempunyai makna diantara 100 orang yang berumur 7-12 tahun 91 orang diantaranya sedang bersekolah SD dan berumur 7-12 tahun.

APM SLTP/MTs meningkat menjadi 49,03 persen di tahun 2009 setelah pada tahun sebelumnya sebesar 48,92 persen. APM SLTP/MTs jauh lebih kecil dibandingkan dengan APM SD/MI hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang ikut berpartisipasi sekolah SLTP/MTs dibandingkan dengan penduduk yang bersekolah SD/MI pada usia 7-12 tahun sangat rendah atau dengan kata lain lebih banyak penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang SLTP/MTs pada penduduk berusia 13-15 tahun.

Pada jenjang pendidikan SLTA/MA di Provinsi Papua Barat tahun 2008, APM-nya lebih rendah dari APM SLTP/MTs. Artinya tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah SLTA/MA tepat pada umur 16-18 tahun lebih rendah dibandingkan partisipasi penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah SLTP/MTs tepat pada usia 13-15 tahun. Dapat diartikan pula proporsi penduduk yang berusia 16-18 tahun untuk melanjutkan sekolah di SLTA/MA lebih kecil dibandingkan dengan proporsi penduduk usia 13-15 tahun

untuk melanjutkan pendidikan SLTP/MTs. APM SLTA//MA mencapai 43,55 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 yang semula sebesar 43,61 persen.

Kecenderungan yang terlihat dari APM untuk jenjang pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi adalah bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang maka tingkat partisipasinya semakin rendah. Dengan demikian semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka angka putus sekolahnya semakin besar.

Berdasarkan sebarannya menurut kabupaten/kota, APM tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI berada di Kabupaten Kaimana yaitu sebesar 96,71 persen; APM SLTP/MTs berada di Kota Sorong sebesar 73,85 persen; APM SLTA//MA di Kabupaten Manokwari sebesar 56,74 persen; dan APM Perguruan Tinggi berada di Kabupaten Fakfak sebesar 11,38 persen.

3.3.4 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas. Level pendidikan penduduk diketahui dari tingkat pendidikan yang ditamatkan dengan diidentifikasi melalui ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Indikator ini dapat pula digunakan untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengetahui level tertinggi pendidikan antar waktu dan antar wilayah.

Semakin tinggi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka menggambarkan semakin baik pula kualitas pendidikan manusianya. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya persentase

penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA keatas). Biasanya terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin kecil persentase penduduk yang lulus pada level pendidikan tersebut.

Tabel 3.13 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Papua Barat 2008-2009

Kabupaten/kota	Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki					Total
	Tidak punyai ijazah	SD/se-derajat	SMP/se-derajat	SLTA/se-derajat	Perguruan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)
Fakfak	27,91	26,16	18,24	21,95	5,75	100,00
Kaimana	35,28	40,25	16,24	6,53	1,70	100,00
Teluk Wondama	48,70	28,03	10,72	11,10	1,45	100,00
Teluk Bintuni	37,15	31,34	15,03	12,97	3,51	100,00
Manokwari	27,96	19,69	15,99	23,18	13,18	100,00
Sorong Selatan	41,99	33,00	17,13	6,19	1,69	100,00
Sorong	47,50	19,96	16,52	12,30	3,73	100,00
Raja Ampat	33,74	30,13	22,23	12,26	1,64	100,00
Kota Sorong	27,66	17,10	17,40	29,23	8,61	100,00
Papua Barat (2009)	33,62	23,64	16,85	19,08	6,82	100,00
Papua Barat (2008)	32,84	25,68	18,16	18,54	4,79	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2007-2009

Dalam Tabel 3.13 secara umum di Provinsi Papua Barat masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini tampak pada besarnya persentase penduduk yang berpendidikan SD kebawah. Pada tahun 2008 persentase penduduk yang berpendidikan SD

kebawah sebesar lebih dari separuh penduduk berusia 10 tahun di Papua Barat atau sebesar 58,52 persen. Persentase penduduk yang berpendidikan SD kebawah sedikit mengalami penurunan pada tahun 2009 yaitu menjadi 57,26 persen. Sementara penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA keatas) pada tahun 2008 adalah sebesar 23,33 persen dengan rincian 18,54 persen berpendidikan SLTA/ sederajat dan 4,79 persen berpendidikan perguruan tinggi. Kondisi penduduk yang berpendidikan tinggi pada tahun 2009 menjadi sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun 2008. Pada tahun 2009 penduduk yang berpendidikan SLTA keatas sebesar 25,89 persen (19,08 persen berpendidikan SLTA dan 6,82 persen berpendidikan perguruan tinggi) atau mengalami peningkatan sebesar 2,56 persen.

Kualitas pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan menurut sebaran kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kota Sorong memiliki kualitas sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tertinggi yang paling baik. Kota Sorong mempunyai persentase penduduk dengan pendidikan tinggi terbesar diantara kabupaten lainnya, yaitu sebesar 37,84 persen. Disamping itu, Kota Sorong juga memiliki persentase penduduk yang berpendidikan rendah yang paling kecil yaitu hanya 44,76 persen. Disisi lain, Kabupaten Teluk Wondama menjadi kabupaten dengan kualitas pendidikan sumber daya manusia paling rendah diantara kabupaten/kota lainnya. Persentase penduduk yang berpendidikan rendah di Kabupaten Teluk Wondama mencapai 76,74 persen dengan rincian 48,70 persen tidak punya ijazah (tidak pernah sekolah/tidak tamat SD) dan 28,03 persen hanya tamatan SD.

Sedangkan persentase penduduk yang berpendidikan tinggi hanya 12,55 persen yang terdiri dari 11,10 persen berpendidikan tertinggi SLTA dan 1,45 persen berpendidikan perguruan tinggi.

3.3.5 Angka Mengulang dan Putus Sekolah

Angka mengulang dan putus sekolah merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan. Angka mengulang mencerminkan ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan proses belajar mengajar pada tingkat tertentu dalam sebuah jenjang pendidikan sehingga mengharuskan siswa tersebut untuk mengulang kembali proses belajar mengajar pada tingkat yang sama pada tahun berikutnya. Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu dan sering pula digunakan sebagai indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, kondisi ekonomi orang tua yang miskin dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan.

Tabel 3.14 Jumlah Siswa Mengulang dan Persentase Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009

Tahun	SD			SLTP			SLTA		
	Siswa meng-ulang	Jumlah Siswa	%	Siswa meng-ulang	Jumlah Siswa	%	Siswa meng-ulang	Jumlah Siswa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2007	4.096	103.272	3,97	210	24.268	0,87	314	23.813	1,32
2008	4.375	109.246	4,00	86	26.658	0,32	357	27.114	1,32
2009	4.896	114.442	4,28	279	31.399	0,89	192	27.810	0,69

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2009

Berdasarkan Tabel 3.14 persentase siswa yang mengulang tertinggi berada pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun 2007 jumlah siswa yang mengulang sebesar 4.096 siswa (3,97 persen). Kondisi tahun 2008 jumlah dan persentase siswa yang mengulang naik menjadi 4.375 siswa atau 4,00 persen. Pada tahun 2009 angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 4,28 persen atau terdapat 4.896 siswa yang mengulang.

Pada jenjang pendidikan SLTP angka mengulang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Persentase siswa mengulang pada jenjang pendidikan ini berturut-turut mengalami penurunan pada tahun 2007-2009 yaitu 0,87 persen; 0,32 persen dan 0,89 persen.

Angka mengulang di jenjang pendidikan SLTA secara persentase menunjukkan angka yang sama pada tahun 2007 dan 2008 yaitu 1,32 persen. Namun secara absolut, jumlah siswa yang mengulang pada tahun 2007-2008 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 jumlah siswa yang mengulang mengalami peningkatan menjadi 314 siswa. Selanjutnya di tahun 2008 jumlah siswa yang mengulang kembali meningkat menjadi 357 siswa. Sementara pada tahun 2009, persentase tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu menjadi 0,69 persen. Secara absolut pun jumlah siswa yang mengulang turun menjadi 192 siswa.

Tabel 3.15 Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Persentase Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009

Tahun	SD			SLTP			SLTA		
	Siswa putus sekolah	jumlah siswa	%	Siswa putus sekolah	jumlah siswa	%	Siswa putus sekolah	jumlah siswa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2007	5.254	103.272	5,09	873	24.268	3,60	906	23.813	3,80
2008	3.815	109.246	3,49	463	26.658	1,74	760	27.114	2,80
2009	3.401	114.442	2,97	927	31.399	2,95	932	27.810	3,35

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2009

Jumlah siswa putus sekolah pada pembahasan ini adalah jumlah siswa yang putus atau tidak melanjutkan sekolahnya pada saat sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Jadi angka putus sekolah disini tidak dapat mendeteksi jumlah siswa putus sekolah lainnya yang terjadi ketika siswa telah lulus dari jenjang pendidikan tertentu dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya karena yang digunakan sebagai pembagi adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu.

Berdasarkan Tabel 3.15 terdapat kecenderungan bahwa angka putus sekolah mengalami penurunan. Namun pada tahun 2009, angka putus sekolah pada jenjang SLTP dan SMA mengalami peningkatan. Pada jenjang pendidikan SD, secara persentase siswa yang putus sekolah mengalami penurunan. Pada tahun 2007 persentase siswa putus sekolah mencapai 5,09 persen. Pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 3,49 persen. Penurunan tersebut

berlanjut pada tahun 2009 dimana persentase siswa putus sekolah hanya 2,97 persen. Sejalan dengan penurunan persentase siswa putus sekolah, secara absolut jumlah siswa yang putus sekolah juga mengalami penurunan pada tahun 2007-2008. Pada tahun 2007 jumlah siswa putus sekolah mencapai 5.254 siswa dan pada tahun 2008 dan 2009, jumlah tersebut berkurang menjadi 3.815 siswa dan 3.401 siswa.

. Pada jenjang pendidikan SLTP pada tahun 2008 jumlah siswa putus sekolah mengalami penurunan dibandingkan keadaan tahun 2007. Semula di tahun 2007 jumlah siswa putus sekolah berjumlah 873 siswa (3,60 persen), namun di tahun 2008 jumlah siswa putus sekolah turun sangat signifikan menjadi 463 siswa (1,74 persen). Jumlah siswa putus sekolah kembali mengalami peningkatan menjadi 927 siswa atau sebesar 2,95 persen di tahun 2009.

Pada jenjang pendidikan SLTA jumlah siswa maupun persentase siswa putus sekolah terus mengalami kecenderungan seperti halnya dengan angka putus sekolah SLTP. Di tahun 2008 jumlah siswa putus sekolah sebesar 760 siswa (2,80 persen), turun dibandingkan tahun 2007 yang semula sebesar 906 siswa (3,80 persen). Semetara jumlah siswa putus sekolah 2009 mengalami peningkatan sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 932 siswa (3,35 persen).

3.3.6 Rasio-rasio Pendidikan

Terdapat banyak sekali indikator-indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kinerja pendidikan. Diantaranya digunakan rasio-rasio dari variabel-variabel pendidikan. Sebagai

contoh adalah rasio guru-murid, guru-kelas, murid-kelas, murid-sekolah, dan kelas-sekolah.

Tabel 3.16 Tabel Rasio-rasio Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009

Tahun	Siswa/Guru			Siswa/Kelas			Kelas/Guru			Siswa/Sekolah			Kelas/Sekolah		
	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2007	21	10	12	33	36	33	0,64	0,29	0,36	133	190	355	4,03	5,23	10,64
2008	20	9	12	29	27	35	0,68	0,34	0,36	141	200	382	4,84	7,34	10,99
2009	19	11	12	30	33	33	0,63	0,34	0,37	144	191	318	4,73	5,87	9,64

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2009

Rasio siswa-guru digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru. Rasio ini untuk mengetahui berapa beban seorang guru mengajar sejumlah siswa. Terlihat bahwa beban guru SD, SLTP dan SLTA masih pada batas yang wajar. Beban seorang guru SD rata-rata mengajar sekitar 20 orang siswa, beban seorang guru SLTP rata-rata mengajar sekitar 10 siswa dan beban seorang guru SLTA rata-rata mengajar 12 orang siswa. Walaupun terlihat sangat wajar dan tidak menanggung beban yang berlebih namun indikator ini hanya mewakili beban secara umum meskipun pada kenyataannya terutama di daerah pedalaman kadang-kadang seorang guru harus mengajar beberapa kelas sekaligus.

Rasio siswa terhadap kelas menggambarkan rata-rata daya tampung siswa dalam satu kelas. Rata-rata daya tampung kelas siswa pada jenjang pendidikan SD tahun 2007-2009 sekitar 29-33 siswa dalam satu kelas. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTP berkisar antara 27-36 siswa dalam satu kelas. Rasio siswa-kelas pada jenjang

pendidikan SLTA berkisar antara 33-35 siswa per kelas. Bila dilihat dari sebaran siswa per kelas masih didalam batas kewajaran.

Rasio kelas-guru digunakan untuk melihat perbandingan jumlah guru dengan jumlah kelas. Rasio ini menggambarkan ketersediaan guru terhadap jumlah ruangan yang ada di sekolah tersebut. Bila nilai rasio ada di atas satu maka dapat dikatakan bahwa banyaknya guru yang ada tidak cukup untuk didistribusikan ke dalam kelas yang tersedia. Hal ini mengandung arti bahwa seorang guru dapat mengajar lebih dari satu kelas karena keterbatasan jumlah guru.

Pada jenjang pendidikan SD nilai rasio kelas-guru seluruhnya berada dibawah satu. Berarti jumlah guru SD yang tersedia cukup untuk didistribusikan ke dalam banyaknya kelas. Namun jumlah guru yang digunakan sebagai pembagi dalam rasio ini termasuk kepala sekolah, guru olah raga, guru agama, guru kesenian dan guru lainnya yang mengajar pelajaran-pelajaran khusus disamping guru yang mengajar setiap harinya.

Hal senada juga terjadi pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA. Seluruh nilai rasio berada di bawah satu. Namun bedanya pada jenjang pendidikan ini nilai rasionya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari nilai rasio pada jenjang pendidikan SD yakni berada diantara 0,29-0,37. Nilai rasio yang semakin kecil menunjukkan ketercukupan jumlah guru dalam memenuhi kuota kelas yang ada. Perlu diketahui bahwa mulai jenjang pendidikan SLTP setiap mata pelajaran diajar oleh guru yang berbeda. Kelemahan dari rasio ini bila diterapkan pada jenjang SLTP maupun SLTA tidak dapat mendeteksi ketidakcukupan guru terhadap kelas tanpa membaginya dengan jumlah mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Jadi masih terjadi

kemungkinan seorang guru dapat mengajar beberapa mata pelajaran yang berbeda meskipun bukan keahliannya mengajar pada mata pelajaran tersebut.

Pada rasio kelas-sekolah dapat dibandingkan berapa rata-rata jumlah kelas di setiap sekolah. Nilai rasio kelas-sekolah bila dibandingkan lagi dengan jumlah tingkat maka dapat diketahui rata-rata ada berapa kelas dalam satu tingkat dalam sekolah.

Rasio kelas-sekolah pada jenjang pendidikan SD bernilai 4,03 pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 rasio kelas-sekolah kembali meningkat menjadi 4,84. Namun pada tahun 2009 rasio tersebut turun menjadi 4,73. Selama tahun 2007-2009 rasio kelas-sekolah untuk jenjang pendidikan SD selalu dibawah enam. Padahal jumlah tingkat untuk jenjang pendidikan SD ada enam, di mulai dari kelas satu sampai dengan kelas enam. Bila nilai rasio berada dibawah nilai enam berarti bahwa rata-rata jumlah kelas di sebuah sekolah hanya sekitar 4-5 unit saja. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat kekurangan jumlah kelas di Provinsi Papua Barat pada jenjang pendidikan SD. Implikasi dari kurangnya ruangan kelas ini adalah ruang kelas di pakai secara bergantian untuk menampung siswa yang tidak mempunyai ruang kelas. Atau kemungkinan dalam sebuah sekolah jumlah tingkatnya tidak sampai dengan kelas enam. Jadi pihak sekolah hanya menyelenggarakan sekolah hanya sampai tingkat sebelum tingkat enam (kelas enam).

Rasio kelas-sekolah pada jenjang pendidikan SLTP diperoleh nilai rasio antara 5-8 artinya rata-rata setiap sekolah mempunyai sekitar 5-8 kelas. Bila jumlah tingkat pada jenjang pendidikan SLTP

sampai pada kelas tiga, berarti tiap tingkat rata-rata mempunyai sekitar dua kelas di sekolah tersebut.

Untuk jenjang pendidikan SLTA, rasio kelas-sekolah berkisar antara 10-11 kelas per sekolah. Bila tingkat pada jenjang ini sampai pada kelas tiga, berarti rata-rata tiap tingkat di setiap sekolah mempunyai 3-4 ruang kelas.

3.3.7 Tingkat Kelulusan Siswa

Disetiap menjelang akhir tahun ajaran sekolah seringkali di media ramai dibicarakan tentang nasib siswa yang telah mengikuti ujian akhir nasional. Pengumuman kelulusan dari hasil nilai ujian nasional diberitakan membawa kegembiraan bagi yang merasa lulus ujian dan kesedihan bagi yang gagal dalam menempuh ujian.

Tingkat kelulusan adalah proporsi siswa kelas enam SD atau siswa kelas tiga SLTP dan SLTA yang dinyatakan lulus ujian akhir nasional terhadap jumlah siswa pada kelas tersebut yang mengikuti ujian akhir nasional.

Tabel 3.17 Tingkat Kelulusan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009

Tahun	SD			SLTP			SLTA		
	Lulus	Tidak Lulus	% Lulus	Lulus	Tidak Lulus	% Lulus	Lulus	Tidak Lulus	% Lulus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2007	11.418	630	94,77	5.770	1.479	79,60	5.901	444	93,00
2008	11.280	555	95,31	7.252	239	96,81	6.318	287	95,65
2009	12.682	577	95,45	7.200	470	93,47	4.449	403	90,94

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2009

Tabel 3.17 memberikan informasi bahwa meskipun bila dilihat secara persentase tingkat kelulusan menunjukkan angka yang tinggi, namun bila dilihat secara absolut, maka jumlah siswa yang tidak lulus termasuk sangat tinggi untuk semua jenjang pendidikan karena masih ratusan jumlahnya. Selain itu tren kelulusan juga mempunyai keseragaman pada semua jenjang pendidikan yaitu meningkat pada tahun 2008 dan kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2009.

Tingkat kelulusan SD pada tahun 2007 mencapai 94,77 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 630 siswa. Persentase kelulusan siswa SD kembali mengalami peningkatan di tahun 2008 menjadi sebesar 95,31 persen dibandingkan dengan tahun 2007. Jumlah siswa yang tidak lulus pun berkurang menjadi 555 siswa. Tingkat kelulusan pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 95,45 persen dengan jumlah siswa tidak lulus sebanyak 577 siswa.

Pada jenjang pendidikan SLTP persentase kelulusan siswa pada tahun 2007 mencapai 79,60 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus mencapai 1.479 siswa. Selanjutnya di tahun 2008 persentase kelulusan siswa kembali membaik. Angka kelulusan kembali mengalami peningkatan menjadi 96,81 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus mencapai 239 siswa. Namun pada tahun 2009 angka kelulusan tersebut kembali mengalami penurunan menjadi 93,47 persen dengan siswa yang tidak lulus sebanyak 470 siswa.

Persentase kelulusan di jenjang pendidikan SLTA di tahun 2007 mencapai 93,00 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus

sebesar 444 siswa. Kondisi di tahun 2008 tingkat kelulusan siswa kembali membaik seiring dengan meningkatnya persentase kelulusan siswa menjadi 95,65 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 287 siswa. Kondisi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2009. Angka kelulusan turun menjadi 90,94 persen dengan siswa yang tidak lulus sebanyak 403 siswa.

3.3.8 Fasilitas pendidikan

Keberhasilan dalam kegiatan pendidikan tidak semata-mata proses transfer ilmu pengetahuan satu arah yang dilakukan oleh seorang guru dengan hanya menerangkan mata pelajaran dan menuliskannya di atas papan tulis. Diperlukan sarana dan fasilitas penunjang yang dapat membuat siswa yang dididik merasa nyaman dan mudah dalam menerima proses belajar mengajar.

Di era moderen dewasa ini sekolah-sekolah mulai menata diri dengan melengkapi fasilitas sekolah dengan perpustakaan dan laboratorium-laboratorium. Perpustakaan adalah gudang ilmu yang didalamnya tersimpan buku-buku yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan para siswa. Perpustakaan tidak hanya berisi buku-buku referensi yang dapat dipakai untuk menunjang aktivitas kegiatan belajar mengajar namun juga tersedia sumber-sumber bacaan yang dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan.

Fasilitas lainnya yang juga penting adalah laboratorium. Untuk mengembangkan *skill* dan daya kreasi siswa, laboratorium dapat dipakai untuk melakukan eksperimen dan penelitian. Untuk menambah kemampuan berbahasa terdapat laboratorium bahasa.

Untuk menambah kemampuan mengoperasikan komputer dengan *software-software* tertentu dan internet diperlukan fasilitas laboratorium komputer yang memadai.

Tabel 3.18 Persentase Fasilitas Perpustakaan Terhadap Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009

Tahun	SLTP			SLTA		
	Sekolah	perpustakaan	%	Sekolah	perpustakaan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007	128	49	38,28	67	36	53,73
2008	133	54	40,60	71	37	52,11
2009	164	31	18,90	56	27	48,21

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2009

Berdasarkan Tabel 3.18 meskipun mengalami perkembangan jumlah, fasilitas perpustakaan untuk jenjang pendidikan SLTP hanya dimiliki oleh kurang dari setengah total sekolah yang ada. Semula pada tahun 2007 fasilitas perpustakaan ada sebanyak 49 buah (38,28 persen). Kemudian fasilitas perpustakaan tersebut kembali bertambah menjadi 54 buah (40,60 persen) pada tahun 2008. Namun pada tahun 2009, fasilitas tersebut berkurang menjadi 31 buah (18,90 persen).

Secara proporsi fasilitas perpustakaan di jenjang pendidikan SLTA dapat dikatakan lebih baik dari pada di SLTP. Pada tahun 2007 jumlah fasilitas perpustakaan hanya berjumlah 36 unit (53,73 persen). Kemudian pada tahun 2008 jumlahnya bertambah menjadi 37 unit (52,11 persen). Namun pada tahun 2009 fasilitas tersebut

berkurang menjadi 27 buah atau hanya 48,21 persen dari sekolah yang ada.

Sangat disayangkan bahwa pada tahun 2009 fasilitas yang ada berkurang. Kemungkinan karena penggunaan fasilitas tersebut dinilai kurang efektif dan di sisi lain masih terasa kurangnya fasilitas kelas maka ada beberapa sekolah yang mengkonversi fasilitas perpustakaan menjadi kelas. Minimnya jumlah fasilitas perpustakaan dan apakah kondisi fasilitas tersebut memadai dari sisi tempat, jumlah buku, jumlah judul buku dan kualitas buku yang dikoleksi seharusnya menjadi perhatian utama karena fasilitas tersebut digunakan sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Disamping itu minat baca siswa juga tidak dapat diketahui dengan pasti. Akan sangat disayangkan bila ada fasilitas perpustakaan yang baik tetapi minat baca siswanya rendah.

Tabel 3.19 Persentase Fasilitas Laboratorium Terhadap Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009

Tahun	SLTP			SLTA		
	Sekolah	Laboratorium	%	Sekolah	Laboratorium	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007	128	21	16,41	67	82	122,39
2008	133	30	22,56	71	91	128,17
2009	164	45	27,44	56	59	105,36

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2009

Pada jenjang pendidikan SLTP terlihat sebuah keadaan yang memprihatinkan dari sisi kondisi fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh sekolah-sekolah. Dari tahun 2007-2009 jumlahnya semakin

meningkat. Semula pada tahun 2007 dari 128 sekolah, 21 diantaranya mempunyai fasilitas laboratorium. Kemudian pada tahun 2008 jumlahnya bertambah menjadi 30 laboratorium atau sebesar 22,56 persen. Pada tahun 2009 jumlah fasilitas laboratorium mengalami peningkatan sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2008. Fasilitas laboratorium menjadi 45 buah atau 27,44 persen dari jumlah SLTP yang ada.

Situasi yang berbeda terjadi pada jumlah fasilitas laboratorium di jenjang pendidikan SLTA. Jumlah laboratorium di SLTA mengalami peningkatan menjadi 91 unit (128,17 persen) pada tahun 2008 setelah sebelumnya pada 2007 berjumlah 82 unit atau 122,39 persen. Sementara pada tahun 2009, persentase SLTA yang memiliki laboratorium tuurun menjadi 105,36 persen.

Proporsi laboratorium yang mencapai lebih dari 100 persen diduga karena terdapat sekolah yang memiliki fasilitas laboratorium lebih dari satu buah. Namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat sekolah yang belum memiliki laboratorium.

3.4 Kondisi Perekonomian

Situasi perekonomian secara makro Provinsi Papua Barat diukur dengan besarnya Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diperoleh dari kumulatif seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun atau biasa dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan kinerja perekonomian diukur dari kenaikan PDRB terhadap tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan 2000. Sementara struktur perekonomian ditunjukkan melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar harga berlaku per sektor.

PDRB Provinsi Papua Barat dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan 2000 (ADHK). Penghitungan juga dibedakan dengan menyertakan minyak dan gas (dengan migas) dan tanpa minyak dan gas (tanpa migas).

3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Total PDRB Provinsi Papua Barat tahun 2009 sebesar Rp. 14,55 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 6,77 triliun atas dasar harga konstan. PDRB tahun 2009 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2008 yaitu Rp. 12,47 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 6,37 triliun atas dasar harga konstan 2000.

Bila tanpa memperhitungkan subsektor migas, besarnya PDRB Provinsi Papua Barat tahun 2009 mencapai Rp. 10,21 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 5,33 triliun atas dasar harga konstan 2000. PDRB tanpa migas juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp. 8,73 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 4,96 triliun atas dasar harga konstan.

Perbedaan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan tanpa migas sebesar Rp. 4,37 triliun atau sekitar 29,81 persen terhadap total PDRB. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi subsektor migas dalam PDRB Papua Barat cukup signifikan.

PDRB menurut kabupaten/kota dengan migas tercatat atas dasar harga berlaku tahun 2009 tertinggi berada di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 5,02 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan dengan migas PDRB tertinggi juga berada di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 1,86 triliun.

Tabel 3.20 PDRB Menurut Kabupaten/Kota ADHB dan ADHK Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Dengan Migas		Tanpa Migas	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	1.179.002,44	585.263,80	1.179.002,44	585.263,80
Kaimana	699.556,49	361.372,45	699.556,49	361.372,45
Teluk Wondama	330.229,73	184.104,35	330.229,73	184.104,35
Teluk Bintuni	1.041.428,59	584.555,37	974.588,08	566.275,35
Manokwari	2.441.458,38	1.083.643,56	2.441.458,38	1.083.643,56
Sorong Selatan	446.495,94	245.905,04	446.495,94	245.905,04
Sorong	5.024.088,71	1.862.021,83	1.136.698,42	660.893,61
Raja Ampat	896.710,49	556.068,82	411.096,14	249.044,70
Kota Sorong	2.480.744,05	1.410.208,12	2.480.744,05	1.410.208,12
Papua Barat (2009)	14.547.727,50	6.768.199,45	10.210.882,61	5.327.747,48
Papua Barat (2008)	12.471.605,76	6.369.374,22	8.735.911,05	4.962.288,45
Papua Barat (2007)	10.369.836,11	5.934.315,82	7.452.203,55	4.566.066,15

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Prov Papua Barat 2009

Catatan: PDRB Kab. Tambrauw masih tergabung dengan Kab. Sorong, PDRB Kab. Maybrat masih tergabung dengan Kab. Sorong Selatan

Sementara bila unsur migas tidak diperhitungkan dalam penghitungan PDRB, maka di tahun 2009, Kota Sorong memiliki nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 tertinggi diantara kabupaten lainnya. Besarnya PDRB Kota Sorong masing-masing Rp. 2,48 triliun dan Rp. 1,41 triliun. PDRB tahun 2009 terendah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 ditempati oleh Kabupaten Teluk Wondama dengan besaran PDRB Rp. 0,33 triliun dan Rp. 0,18 triliun.

3.4.2 Struktur Ekonomi Regional

Struktur perekonomian Papua Barat ditunjukkan melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar harga berlaku per sektor. Struktur ini memperlihatkan sektor-sektor utama yang berkontribusi besar dalam perekonomian.

Pada tahun 2009, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Papua Barat sebesar 24,52 persen. Kemudian sektor industri pengolahan memberikan kontribusi 24,39 persen, sektor pertambangan dan penggalian menyumbangkan 13,24 persen, dan sektor lainnya memberikan sumbangan terhadap PDRB masing-masing kurang dari 10 persen.

Berdasarkan Tabel 3.20 terdapat tiga sektor unggulan yang memberikan kontribusi masing-masing diatas 10 persen terhadap total PDRB dari tahun 2007-2009. Keempat sektor tersebut adalah sektor pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan-penggalian. Sektor pertanian selalu memberikan kontribusi terbesar PDRB dari tahun 2007-2009, namun besarnya sumbangan senantiasa mengalami penurunan setiap tahunnya. Kontribusi sektor

pertanian tahun 2007 sebesar 26,64 persen terus menurun menjadi 24,91 persen di tahun 2008 dan 24,52 persen di tahun 2009.

Tabel 3.21 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009

Lapangan Usaha	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	26,64	24,91	24,52
Pertambangan dan Penggalian	15,98	14,81	13,24
Industri Pengolahan	20,10	22,74	24,39
Listrik, Gas & Air Bersih	0,56	0,53	0,51
Bangunan	8,61	9,23	9,81
Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,58	10,35	9,99
Pengangkutan dan Komunikasi	7,44	6,95	7,28
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,07	2,42	2,40
Jasa-jasa	8,03	8,06	7,86
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Prov Papua Barat 2009

Demikian pula dengan sektor pertambangan dan penggalian, sektor ini memberikan kontribusi terbesar ketiga selama tahun 2007-2009. Sama halnya dengan sektor pertanian, pada sektor pertambangan dan penggalian juga terus mengalami penurunan persentase sumbangan terhadap PDRB.

Sektor industri pengolahan selalu konsisten memberikan kontribusi terbesar kedua selama tahun 2007-2009, bahkan persentase sumbangan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan dari tahun 2007-2009. Kontribusi sektor industri

pengolahan tahun 2007 sebesar 20,11 persen, kemudian tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 22,74 persen. Pada tahun 2009 kembali mengalami peningkatan menjadi 24,39 persen.

Penurunan secara berangsur-angsur sektor pertanian dan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun pada sektor industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; dan jasa-jasa di dalam memberikan nilai tambah pada PDRB menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau sektor tersier.

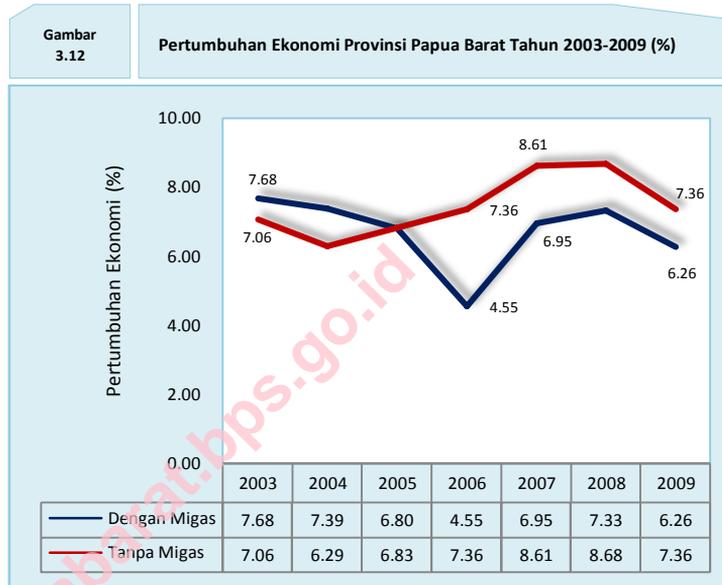
3.4.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah biasanya dengan membandingkan besarnya nilai tambah antar waktu menurut harga konstan. Dengan menggunakan dasar harga konstan dapat diketahui sejauh mana pertumbuhan riil dari suatu daerah yang menggambarkan kondisi perekonomian yang dapat diperbandingkan antar waktu dan antar daerah.

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2009 dengan migas sebesar 6,26 persen. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008 sebesar 6,95 persen dan 7,33 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun dengan migas dari tahun 2003-2009 sebesar 6,71 persen.

Dengan tanpa memperhitungkan subsektor migas (tanpa migas), pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2009 sebesar 7,36 persen. Kondisi ini juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 8,68 persen maupun tahun 2007 sebesar 8,61

persen. Pertumbuhan ekonomi rata-rata dari tahun 2003-2009 tanpa migas Papua Barat mencapai 7,46 persen.



3.4.4 PDRB per Kapita

Sebuah nilai yang cukup relevan dalam menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk secara makro ekonomi adalah dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita. Pada PDRB per kapita, besaran nilai PDRB telah dibagi dengan jumlah penduduk dari wilayah tersebut. Jadi besarnya PDRB telah tertimbang dengan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah, sehingga tingginya PDRB tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar.

PDRB per kapita Papua Barat dengan migas tahun 2009 mencapai Rp. 19,56 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 9,10 juta

atas dasar harga konstan 2000. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan keadaan tahun 2008 sebesar Rp. 17,09 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 8,73 juta atas dasar harga konstan 2000. Sedangkan PDRB per kapita Papua Barat tanpa migas tahun 2009 mencapai Rp. 13,73 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 7,16 juta atas dasar harga konstan 2000. Kondisi tersebut juga lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp. 11,97 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 6,80 juta atas dasar harga konstan 2000.

Tabel 3.22 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	Dengan Migas		Tanpa Migas	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	17,308,744.52	8,592,163.31	17,308,744.52	8,592,163.31
Kaimana	16,340,959.80	8,441,309.38	16,340,959.80	8,441,309.38
Teluk Wondama	14,011,189.81	7,811,292.53	14,011,189.81	7,811,292.53
Teluk Bintuni	18,661,922.52	10,474,964.15	17,464,171.27	10,147,394.57
Manokwari	13,805,483.71	6,127,576.71	13,805,483.71	6,127,576.71
Sorong Selatan	7,134,460.40	3,929,262.53	7,134,460.40	3,929,262.53
Sorong	50,385,998.77	18,673,999.41	11,399,815.66	6,628,024.82
Raja Ampat	21,421,655.37	13,284,013.97	9,820,739.08	5,949,467.31
Kota Sorong	14,376,291.16	8,172,371.72	14,376,291.16	8,172,371.72
Papua Barat (2009)	19,557,024.70	9,098,729.94	13,726,850.69	7,162,279.41
Papua Barat (2008)	17,085,280.82	8,725,624.37	11,967,624.42	6,798,009.27
Papua Barat (2007)	14,483,031.55	8,288,162.16	10,408,120.05	6,377,196.27

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Prov Papua Barat 2009

Catatan: PDRB Kab. Tambrauw masih tergabung dengan Kab. Sorong, PDRB Kab. Maybrat masih tergabung dengan Kab. Sorong Selatan

PDRB per kapita dengan migas tertinggi menurut kabupaten/kota berdasarkan Tabel 3.22 adalah Kabupaten Sorong yakni sebesar Rp 50,39 juta atas dasar harga berlaku dan Rp 18,67 juta atas dasar harga konstan 2000. Sedangkan PDRB per kapita tanpa migas tertinggi berada di Kabupaten Teluk Bintuni yakni mencapai Rp.17,46 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 10,15 juta atas dasar harga konstan 2000.

Sedangkan PDRB per kapita dengan migas terendah berada di Kabupaten Sorong Selatan sebesar Rp. 7,13 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 3,93 juta atas dasar harga konstan 2000. Bila tanpa memperhitungkan subsektor minyak dan gas (tanpa migas) PDRB per kapita terendah masih tetap ditempati Kabupaten Sorong Selatan sebesar Rp. 7,13 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 3,93 juta atas dasar harga konstan 2000.

Hal menarik terjadi ketika membandingkan PDRB per kapita dengan migas dan tanpa migas terutama bagi kabupaten penghasil migas terbesar seperti Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Dengan menyertakan migas, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat semula memiliki PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi pertama dan kedua sebesar Rp. 50,39 juta dan Rp. 21,42 juta, namun ketika unsur migas tidak disertakan dalam penghitungan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku maka peringkatnya langsung anjlok ke posisi terendah ketiga dan kedua. PDRB per kapita kabupaten tersebut menjadi Rp. 11,40 juta di Kabupaten Sorong dan Rp. 9,82 juta di Kabupaten Raja Ampat.

BAB IV

PERKEMBANGAN KOMPONEN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2007-2009

IPM tersusun atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi perekonomian yang bermakna kehidupan yang layak digambarkan dengan kemampuan daya beli (paritas daya beli). Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang menyusunnya. Sedangkan komponen-komponen tersebut bervariasi dalam tiap kabupaten/kota. Kemajuan ini sangat tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Perkembangan komponen-komponen penyusun IPM selanjutnya akan dibahas untuk melihat komponen-komponen mana yang berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan capaian IPM kabupaten/kota maupun Provinsi Papua Barat.

Mulai tahun 2009, penghitungan IPM 2009 telah menyertakan dua kabupaten pemekaran baru, yakni Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. Kabupaten Tambrauw adalah hasil pemekaran dari Kabupaten

Sorong, sedangkan Kabupaten Maybrat adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan. Dengan demikian di tahun 2009 ini hasil pembangunan manusia yang terukur melalui IPM di Provinsi Papua Barat di bagi menjadi sepuluh kabupaten dan satu wilayah kota.

Dalam pemekaran wilayah terdapat kemungkinan kabupaten pemekarannya lebih maju dibandingkan dengan kabupaten induknya atau sebaliknya. Dimungkinkan pula tingkat disparitasnya, sangat memungkinkan antara kabupaten yang dimekarkan jauh tertinggal dari kabupaten induknya.

4.1. Perkembangan Kesehatan

Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.

Berdasarkan Tabel 4.1, secara umum angka harapan hidup di masing-masing daerah selalu mengalami kemajuan. Di tahun 2009, angka harapan hidup Provinsi Papua Barat mencapai 68,20 tahun artinya rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat dapat menjalani hidup selama 68 tahun. Sedangkan rata-rata angka harapan hidup di masing-masing kabupaten/kota sebesar 67,80 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Sorong sebesar 71,53 tahun dan angka harapan hidup terendah di Kabupaten Raja Ampat sebesar 65,75 tahun.

Kemajuan angka harapan hidup dapat digambarkan dengan membandingkannya antar tahun. Perkembangan angka harapan hidup tahun 2007-2008 Provinsi Papua Barat tercatat hanya mengalami

kemajuan 0,30 tahun selama satu tahun. Peningkatan angka harapan hidup tertinggi terjadi di Kabupaten Fakfak sebesar 0,54 tahun dalam waktu satu tahun. Sementara angka harapan hidup terendah sebesar 0,14 tahun terjadi di Kabupaten Sorong Selatan. Sementara perkembangan angka harapan hidup tahun 2008-2009 Perkembangan angka harapan hidup di Papua Barat di tahun 2008-2009 mengalami peningkatan yang sama seperti di tahun 2008-2009 yaitu mengalami perubahan 0,30 tahun selama satu tahun. Peningkatan tertinggi di tahun 2009 terjadi di Kabuapten Fakfak dan Kabupaten Sorong sebesar 0,36 tahun, sedangkan Kabupaten Sorong Selatan memiliki kemajuan peningkatan angka harapan hidup terkecil yaitu sebesar 0,16 tahun.

Tabel 4.1 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	69,27	69,81	70,16
Kaimana	69,06	69,26	69,48
Teluk Wondama	66,78	67,00	67,25
Teluk Bintuni	67,26	67,55	67,88
Manokwari	67,12	67,38	67,67
Sorong Selatan	66,19	66,33	66,49
Sorong	66,71	67,12	67,49
Raja Ampat	65,15	65,43	65,75
Tambrauw	-	-	66,09
Maybrat	-	-	66,03
Kota Sorong	70,75	71,12	71,53
Papua Barat	67,60	67,90	68,20

Sumber: Diolah dari Susenas 2007-2009

Fakta perkembangan angka harapan hidup per tahun di Provinsi Papua Barat tercatat tidak melebihi dari satu tahun dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Hal ini berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Provinsi Papua Barat termasuk dalam kategori *Hardrock*, artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Sehingga implikasinya adalah angka harapan hidup yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari perkembangan angka harapan hidup yang tidak melebihi satu digit dalam kurun waktu satu tahun. Kondisi tersebut juga terjadi untuk kondisi nasional, penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat.

4.2. Perkembangan Pendidikan

Perkembangan komponen pendidikan direpresentasikan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk untuk menempuh pendidikan formal. Bobot kedua indikator ini dalam membentuk komponen pendidikan adalah 2:1 atau dua per tiga bagian adalah angka melek huruf dan sepertiga bagian adalah rata-rata lama sekolah.

4.2.1. Perkembangan Angka Melek Huruf

Angka melek huruf Provinsi Papua Barat tahun 2009 mencapai 92,34 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2007 dan 2008 masing-masing sebesar 90,32

persen dan 92,15 persen. Selama tahun 2008-2009 angka melek huruf Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen, sedangkan selama periode 2007-2009 mengalami peningkatan sebesar 2,02 persen.

Berdasarkan Tabel 4.2, diperoleh informasi bahwa selama kurun waktu tiga tahun Kota Sorong memiliki angka melek huruf tertinggi diantara kabupaten lainnya, yaitu sebesar 99,12 persen. Angka melek huruf Kota Sorong mengalami stagnasi karena AMH Kota Sorong sudah tergolong dalam AMH tinggi sehingga sangat sulit untuk mengalami peningkatan. Hal ini seringkali disebabkan angka buta huruf terjadi pada penduduk usia lanjut yang sudah enggan untuk belajar membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya.

Tabel 4.2 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	97,17	97,17	97,18
Kaimana	95,48	95,48	95,49
Teluk Wondama	81,02	82,85	83,13
Teluk Bintuni	80,84	82,67	82,98
Manokwari	83,54	85,37	85,67
Sorong Selatan	87,90	88,07	88,20
Sorong	91,39	91,39	91,40
Raja Ampat	89,93	92,69	92,77
Tambrauw	-	-	76,38
Maybrat	-	-	89,80
Kota Sorong	99,10	99,10	99,12
Papua Barat	90,32	92,15	92,34

Sumber: Diolah dari Susenas 2007-2009

Sementara angka melek huruf terendah selama kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni, yakni masing-masing sebesar 80,84 persen (2007) dan 82,67 persen (2008), sementara di tahun 2009 Kabupaten Tambrauw menjadi kabupaten dengan angka melek huruf terendah, yaitu sebesar 76,38 persen. Meskipun demikian, dalam hal perkembangan peningkatan capaian angka melek huruf Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan progres yang sangat baik. Selama tahun 2007-2009 kabupaten ini mampu meningkatkan persentase angka melek huruf sebesar 2,14 persen atau berada di urutan ke dua setelah kabupaten Raja Ampat sebesar 2,84 persen. Capaian angka melek huruf Kabupaten Teluk Bintuni yang relatif masih rendah ini membuat lebih mudah didongkrak naik dari pada untuk menaikkan angka melek huruf di Kota Sorong. Contoh lainnya adalah Kabupaten Fakfak, Kaimana dan Sorong yang mengalami stagnasi karena capaian angka melek huruf daerah tersebut telah mencapai di atas 90 persen.

4.2.2. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Bila angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua Barat rendah maka kemungkinan besar angka rata-rata lama sekolahnya juga akan rendah.

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua bergerak sangat lambat. Pada tahun 2009 rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat mencapai 8,01 tahun atau hanya mengalami peningkatan sebesar 0,34 tahun dalam waktu satu tahun

dibandingkan dengan tahun 2008. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2007, angka rata-rata lama sekolah hanya meningkat sebesar 0,36 tahun dalam kurun waktu dua tahun.

Angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,01 tahun mengandung arti rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat hanya mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 SLTP atau putus sekolah pada kelas 3 SLTP. Kondisi ini bahkan hampir dapat dikatakan hanya terjadi sedikit perubahan selama kurun waktu tiga tahun yaitu periode tahun 2007-2009.

Tabel 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	8,93	8,93	9,09
Kaimana	7,10	7,10	7,32
Teluk Wondama	5,99	6,39	6,44
Teluk Bintuni	6,44	6,85	6,88
Manokwari	7,19	7,59	7,95
Sorong Selatan	7,90	7,90	7,94
Sorong	8,00	8,00	8,04
Raja Ampat	7,00	7,00	7,26
Tambrau	-	-	4,21
Maybrat	-	-	6,92
Kota Sorong	10,10	10,52	10,54
Papua Barat	7,65	7,67	8,01

Sumber: Diolah dari Susenas 2007-2009

Berdasarkan Tabel 4.3, di tahun 2009, Kota Sorong mempunyai rata-rata lama sekolah tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Rata-rata lama sekolah di Kota Sorong mencapai 10,54 tahun, atau rata-rata penduduk Kota Sorong mampu mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SLTA. Sementara rata-rata lama sekolah terendah terjadi di Kabupaten Tambrauw sebesar 4,21 tahun. Di kabupaten ini rata-rata penduduk hanya mampu bersekolah sampai dengan kelas 4 SD atau putus sekolah setelah kelas 5 SD.

4.3. Perkembangan Paritas Daya Beli

Komponen terakhir yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah dimensi ekonomi yaitu kemampuan untuk hidup layak. Komponen ini digambarkan dengan paritas daya beli. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli.

Untuk itu dalam penghitungan daya beli ini telah menggunakan harga yang telah distandarkan dengan kondisi Jakarta Selatan sebagai rujukannya. Penggunaan standar harga ini untuk mengeliminasi perbedaan harga antar wilayah sehingga perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat diperbandingkan.

Paritas daya beli Provinsi Papua Barat tahun 2009 adalah sebesar Rp. 595.280,- meningkat seiring dengan semakin tingginya

kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2008 yang mencatat paritas daya beli sebesar Rp. 593.130,-. Kondisi tersebut juga meningkat dibandingkan dengan situasi pada tahun 2007 yang mempunyai paritas daya beli masyarakat sebesar Rp. 592.070,-. Kenaikan paritas daya beli ini diperkirakan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduk sehingga dengan adanya kenaikan pendapatan tersebut mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan untuk melanjutkan sekolah dan mengakses fasilitas kesehatan menjadi semakin baik.

Tabel 4.4 Paritas Daya Beli Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	577,90	582,51	585,63
Kaimana	591,70	596,37	599,40
Teluk Wondama	590,40	597,65	600,79
Teluk Bintuni	596,10	596,30	597,49
Manokwari	579,20	584,87	588,11
Sorong Selatan	582,10	585,70	587,90
Sorong	591,10	596,11	597,45
Raja Ampat	554,60	558,87	560,49
Tambrau	-	-	440,53
Maybrat	-	-	580,93
Kota Sorong	628,30	633,78	634,63
Papua Barat	592,07	593,13	595,28

Sumber: Diolah dari Susenas 2007-2009

Menurut Tabel 4.4, Kota Sorong mempunyai paritas daya beli tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu 628,30 ribu (2007); 633,78 ribu (2008); dan 634,63 ribu (2009). Sementara Kabupaten Raja Ampat memiliki paritas daya beli terendah selama tahun 2007 dan 2008, yaitu 554,30 ribu dan 558,87 ribu. Sedangkan untuk tahun 2009 Kabupaten Tambrauw adalah kabupaten yang memiliki paritas daya beli terendah yaitu sebesar 440,53 ribu.

Kenaikan paritas daya beli Provinsi Papua Barat ternyata juga diikuti oleh kenaikan indeks daya beli. Indeks daya beli pada tahun 2009 Provinsi Papua Barat sebesar 54,37, atau kondisi ini lebih baik bila dibandingkan dengan indeks daya beli tahun 2007 dan 2008 yang masing-masing mempunyai nilai indeks sebesar 53,63 dan 53,88.

4.4. Perkembangan IPM

Secara umum besarnya capaian IPM Provinsi Papua Barat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan daerah tingkat II di Provinsi Papua Barat tidak satupun yang mengalami penurunan angka IPM. Perkembangan capaian nilai IPM menandakan usaha-usaha pembangunan manusia telah berjalan, meskipun ada yang mengalami kemajuan yang pesat dan ada juga yang lambat berkembang.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2009 dua kabupaten 'pendatang baru' telah dapat dihitung besaran IPM-nya, yaitu Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat.

Tabel 4.5 IPM dan Perubahan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009

Kabupaten/Kota	IPM			Perubahan (poin)		
	2007	2008	2009	2007-2008	2008-2009	2007-2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fak-Fak	69,58	70,24	70.80	0,66	0,56	1,22
Kaimana	68,80	69,27	69.80	0,47	0,53	1,00
Teluk Wondama	63,40	64,79	65.27	1,39	0,48	1,86
Teluk Bintuni	64,40	65,29	65.65	0,89	0,36	1,25
Manokwari	64,17	65,46	66.20	1,29	0,74	2,03
Sorong Selatan	65,38	65,77	66.09	0,39	0,32	0,71
Sorong	67,21	67,82	68.16	0,61	0,34	0,95
Raja Ampat	62,47	63,57	64.08	1,10	0,51	1,61
Tambrau	-	-	49.12	-	-	-
Maybrat	-	-	64.89	-	-	-
Kota Sorong	75,59	76,52	76.84	0,93	0,32	1,25
Papua Barat	67,28	67,95	68,58	0,67	0,63	1,30

Sumber: Diolah dari Susenas 2007-2009

IPM Provinsi Papua Barat pada tahun 2007 sebesar 67,28, kondisi ini mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi 67,95 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,67 poin selama setahun. Di tahun 2009 IPM Provinsi Papua Barat kembali mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin dibandingkan dengan tahun 2008 menjadi 68,58. Meskipun mengalami peningkatan tetapi capaian IPM tahun 2009 pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan tahun 2007-2008. Selama periode 2007-2009 capaian IPM Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan sebesar 1,30 poin.

Dari hasil capaian IPM, Kota Sorong menduduki peringkat terbaik di Papua Barat tahun 2007-2009. Capaian nilai IPM-nya pun jauh lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat. Capaian IPM Kota Sorong berturut-turut 75,59 (2007); 76,52 (2008); dan 76,84 (2009). Sementara Kabupaten Raja Ampat selama tahun 2007-2008 selalu menjadi peringkat terakhir dalam rangking capaian IPM Provinsi Papua Barat yaitu 62,47 (2007) dan 63,87 (2008). Namun di tahun 2009 Kabupaten Tambrauw berada pada urutan terakhir dengan besaran IPM 49,12. Capaian IPM Kabupaten Tambrauw menurut UNDP termasuk dalam kategori rendah yaitu pada kisaran dibawah 50,00.

Hasil capaian IPM setiap kabupaten/kota setiap tahun selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan capaian IPM bervariasi setiap daerah. Beberapa daerah memiliki pertumbuhan yang pesat, sementara beberapa daerah lainnya pertumbuhannya terkesan lambat. Pada tahun 2007-2008, diantara kabupaten/kota tersebut yang memiliki pertumbuhan yang relatif cepat adalah Kabupaten Teluk Wondama (1,39 poin), Kabupaten Manokwari (1,29 poin), dan Kabupaten Raja Ampat (1,10 poin). Sementara kabupaten/kota lainnya memiliki pertumbuhan capaian IPM dibawah satu digit.

Di tahun 2008-2009, tidak satupun kabupaten/kota yang memperoleh capaian IPM diatas satu digit dalam waktu satu tahun. Peningkatan tertinggi hanya sebesar 0,74 poin dalam waktu satu tahun yang dicapai oleh Kabupaten Manokwari. Meskipun selalu tumbuh positif namun delapan dari sembilan kabupaten/kota mengalami perlambatan pertumbuhan terhadap periode sebelumnya. Termasuk yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah capaian IPM Provinsi Papua Barat. Kabupaten Kaimana adalah satu-satunya yang tidak mengalami

perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kabupaten ini mengalami peningkatan pertumbuhan dari 0,47 poin di periode 2007-2008 menjadi 0,53 poin di periode 2008-2009.

Selama kurun waktu tiga tahun yaitu periode 2007-2009, Kabupaten Manokwari memiliki pertumbuhan capaian IPM yang tertinggi yaitu mencapai 2,03 poin. Sejak menjadi ibukota Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari menunjukkan performa yang pesat. Capaian tertinggi selanjutnya adalah Kabupaten Teluk Wondama (1,86 poin) dan Kabupaten Raja Ampat (1,61 poin). Kedua kabupaten ini selalu menempati urutan terbawah dalam capaian IPM di Provinsi Papua Barat (belum termasuk Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat yang baru masuk daftar hitung sehingga belum dapat dilihat perubahannya dibandingkan dengan periode sebelumnya). Kecenderungan pencapaian komponen-komponen penyusun IPM menunjukkan bahwa komponen yang capaiannya masih cukup rendah mempunyai peluang untuk lebih cepat berkembang atau meningkat dalam capaian yang tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang telah memiliki komponen yang sudah tinggi atau mendekati nilai maksimum.

Pada penjelasan di atas terlihat bahwa besaran IPM Provinsi Papua Barat merepresentasikan besaran IPM keseluruhan kabupaten/kota. Oleh karena itu, besar atau kecilnya besaran IPM kabupaten/kota sangat mempengaruhi besaran IPM provinsi.

Jika selama periode tahun 2007-2009 besaran IPM kabupaten/kota dibandingkan dengan besaran IPM provinsi, maka terdapat tiga kabupaten/kota yang besarnya relatif lebih tinggi terhadap IPM provinsi. Ketiga kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana dan Kota Sorong.

4.5. Reduksi *Shortfall*

Reduksi *shortfall* ditujukan untuk melihat kemajuan atau kemunduran dari pencapaian sasaran pembangunan manusia di suatu daerah selama kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, melalui reduksi *shortfall* ini dapat dilihat kecepatan perkembangan IPM suatu daerah.

Terdapat sebuah kecenderungan dalam pencapaian IPM, jika nilai IPM semakin mendekati nilai maksimumnya (100), maka pertumbuhannya akan semakin lambat. Sebaliknya jika angka capaian IPM masih berada pada level yang rendah maka kemampuan untuk memacu pertumbuhan yang tinggi dalam capaian IPM akan lebih mudah.

Pada tahun 2006-2007 reduksi *shortfall* Papua Barat mencapai 3,54. Pada tahun 2007-2008 reduksi *shortfall* Provinsi Papua Barat mengalami perlambatan menjadi 2,05. Dan reduksi *shortfall* Papua Barat kembali mengalami perlambatan menjadi 1,95 pada periode 2008-2009.

Reduksi *shortfall* kabupaten/kota pada tahun 2006-2007 bervariasi besarnya. Kabupaten Kaimana memiliki reduksi *shortfall* yang paling tinggi untuk periode ini, yaitu mencapai 5,14. Kemudian disusul Kabupaten Sorong Selatan di peringkat kedua dengan capaian sebesar 4,14. Kabupaten Fakfak memiliki capaian reduksi *shortfall* tertinggi ketiga yaitu sebesar 4,02.

**Tabel 4.6 Reduksi Shortfall Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009**

Kabupaten/Kota	2006-2007	2007-2008	2008-2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	4,02	2,16	1,89
Kaimana	5,14	1,50	1,72
Teluk Wondama	2,46	3,79	1,36
Teluk Bintuni	3,98	2,48	1,05
Manokwari	3,07	3,58	2,15
Sorong Selatan	4,14	1,13	0,94
Sorong	2,98	1,88	1,04
Raja Ampat	0,52	2,93	1,40
Tambrauw	-	-	-
Maybrat	-	-	-
Kota Sorong	2,79	3,83	1,34
Papua Barat	3,54	2,05	1,95

Sumber: Diolah dari Susenas 2007-2009

Pada periode 2007-2008 capaian reduksi *shortfall* untuk tiap kabupaten/kota masih relatif tinggi terutama pada kabupaten pemekaran. Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Teluk Bintuni memiliki percepatan pertumbuhan yang relatif tinggi. Hal ini terlihat dari besaran reduksi *shortfall* yang dicapai, yaitu masing-masing 3,79; 2,93 dan 2,48. Untuk daerah yang mempunyai capaian IPM rendah seperti ketiga kabupaten tadi memang lebih mudah untuk memacu pertumbuhan IPM lebih cepat. Hal ini terlihat dari tingginya capaian reduksi *shortfall* dari kabupaten tersebut. Meskipun demikian, capaian reduksi *shortfall* Kota Sorong adalah yang tertinggi pada periode

ini, yaitu dengan capaian 3,83, dan reduksi *shortfall* terendah berada di Kabupaten Sorong Selatan sebesar 1,13. Sementara reduksi *shortfall* Provinsi Papua Barat mengalami perlambatan di tahun 2007-2008. Semula reduksi *shortfall*-nya sebesar 3,54, mengalami perlambatan menjadi 2,05.

Pada periode 2008-2009 reduksi *shortfall* Papua Barat kembali mengalami perlambatan. Di periode ini reduksi *shortfall* Papua Barat melambat menjadi 1,95. Sebaran reduksi *shortfall* pada periode ini lebih merata antar kabupaten/kota. Reduksi *shortfall* berada pada kisaran 0,92-2,15 dengan capaian tertinggi di Kabupaten Manokwari dan terendah berada di Kabupaten Sorong Selatan. Sebagai ibukota provinsi, Kabupaten Manokwari terus berbenah diri dan mulai mengejar ketertinggalan dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Manokwari di periode ini merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua Barat yang memiliki reduksi *shortfall* diatas dua.

BAB V DISPARITAS IPM ANTAR WILAYAH

Paradigma pembangunan manusia telah mendapatkan perhatian bagi para pembuat kebijakan. Pemerintah daerah kini tidak lagi hanya berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi semata. Pengalaman beberapa negara yang telah sukses, keberhasilan pembangunan manusia biasanya juga akan diikuti oleh keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan manusia tentunya sangat terkait dengan masalah kependudukan. Jumlah penduduk yang besar dan atau pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mendatangkan permasalahan dalam kinerja pembangunan manusia karena yang dibangun adalah manusia atau penduduk. Jadi ketika jumlah penduduk besar atau pertumbuhan penduduknya tinggi maka penanganan dalam pembangunan manusia yang mempunyai objek pembangunan manusia/penduduk akan lebih kompleks dibandingkan dengan jumlah penduduk yang relatif lebih kecil dan pertumbuhan penduduk yang relatif rendah.

Provinsi Papua Barat memiliki salah satu dari permasalahan tersebut, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dalam periode tahun 2000-2009 Provinsi Papua Barat adalah provinsi ketiga yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk terbesar di Indonesia yaitu 3,43 persen per tahun setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau (BPS, 2009). Sebagai daerah yang “baru”, Provinsi Papua Barat adalah provinsi termuda di Indonesia. Dengan predikat sebagai daerah yang

termuda tentu saja provinsi ini sedang dalam kondisi membangun secara pesat karena harus mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lainnya.

Secara ekonomi, pembangunan Papua Barat tergolong cukup bagus. Hal ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 yang mencapai 6,26 persen. Kondisi ini lebih bagus dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional hanya mencapai 4,2 persen pada tahun yang sama. Lantas bagaimana kondisi pembangunan manusia Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota diantara provinsi-provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia?

Sebelum membahas kondisi maupun posisi Papua Barat dan kabupaten/kotanya terhadap daerah lainnya di Indonesia perlu diketahui terlebih dahulu kondisi antar wilayah di Provinsi Papua Barat.

5.1 Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Posisi relatif IPM kabupaten/kota di sini adalah keterbandingan relatif antar masing-masing besaran IPM kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat pada tahun 2007-2009.

Adapun posisi relatif masing-masing IPM kabupaten/kota akan diukur melalui kesamaan capaian IPM atau dengan mengukur jarak posisi IPM terhadap suatu besaran relatif yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada gambar boxplot berikut ini akan memberikan gambaran sebaran angka IPM Provinsi Papua Barat 2006-2009. Gambar tersebut menunjukkan apakah sebaran IPM antar wilayah telah terdistribusi dengan baik dan mempunyai sebaran yang relatif homogen.

Kotak pada boxplot memuat 50 persen data atau mempunyai batas persentil ke-25 dan ke-75 sedangkan garis yang ada ditengah kotak adalah nilai median data (nilai tengah). Rata-rata IPM tahun 2008 adalah

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2009

paling tinggi, kemudian disusul oleh IPM tahun 2007, 2009 dan 2006. Hal ini ditunjukkan oleh letak bidang kotak tahun 2008 yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun 2007, 2009 dan 2006.

Untuk melihat sebaran IPM antar kabupaten/kota dapat diketahui dari gambar boxplot. Bila tanda garis horizontal di dalam kotak tepat persis berada ditengah boxplot, distribusi dapat dikatakan normal atau sebaran IPM antar kabupaten/kota merata. Jika garis horizontal ada disisi agak keatas tandanya distribusi menceng ke kiri dan sebaliknya bila garis horizontal berada agak ke bawah, tandanya distribusi menceng ke kanan. Semakin tanda garis horizontal mendekati atap atau alas boxplot maka kemencengan distribusi semakin ekstrim dan sebaran semakin tidak merata.

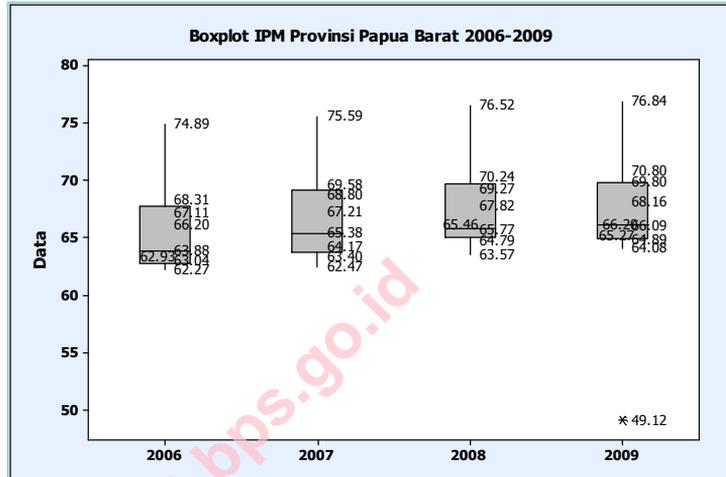
Dari keempat boxplot (IPM 2006-2009) terlihat bahwa posisi garis pada boxplot berada disebelah agak kebawah. Sehingga dapat dikatakan sebaran IPM Papua Barat dari tahun 2006-2009 mempunyai distribusi menceng ke kanan. Artinya sebagian besar IPM kabupaten/kota berada dibawah nilai rata-rata IPM seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat.

Dari sebaran capaian nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat terdapat dua kabupaten/kota yang nilainya ekstrim dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kedua daerah tersebut adalah Kota sorong dan Kabupaten Tambrauw. Kota Sorong memiliki nilai ekstrim jauh diatas capaian kabupaten lainnya. Sedangkan Kabupaten Tambrauw ekstrim karena jauh dibawah kabupaten/kota lainnya.

Kabupaten Tambrauw adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong. Bila dilihat dari infrastruktur wilayah, daerah ini memang sangat jauh tertinggal. Akses untuk menuju distrik-distriknya pun relatif sulit dan membutuhkan biaya yang tinggi.

Gambar 5.1

Boxplot IPM Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2009



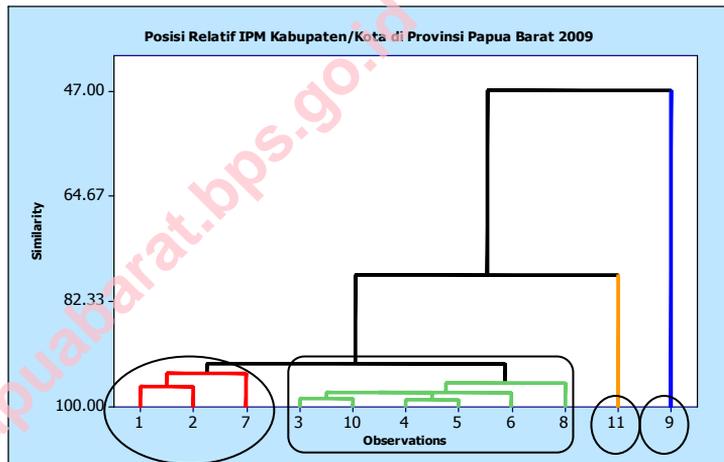
Posisi relatif IPM lainnya dapat diketahui dari kesamaan capaian yang telah diraih oleh masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM yang relatif sama dapat digabungkan ke dalam satu kelompok. Melalui proses ini diharapkan dapat membentuk lebih dari satu kelompok capaian IPM kabupaten/kota, sehingga nantinya dapat berguna untuk melihat posisi relatif capaian IPM.

Dilihat berdasarkan kesamaan capaian IPM, posisi relatif kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pertama, kelompok IPM bawah. Kelompok ini terdiri dari Kabupaten Tambrauw (9), dengan capaian IPM hanya 49,12 . Kelompok kedua adalah kelompok menengah bawah, yaitu Kabupaten Manokwari (5), Sorong Selatan (6), Teluk Bintuni (4), Teluk Wondama (3), Maybrat (10), dan Raja Ampat (8). Capaian rata-rata IPM di keenam kabupaten tersebut 67,5 kebawah. Kelompok ketiga adalah kelompok menengah

menengah yang terdiri dari Kabupaten Fakfak (1), Kaimana (2) dan Sorong(7). Capaian IPM di ketiga kabupaten ini antara 67,5 hingga 75. Sedangkan Kelompok yang terakhir adalah kelompok menengah atas adalah IPM Kota Sorong (9). Capaian IPM Kota Sorong berada pada kisaran 75-80.

Gambar 5.2

Dendrogram Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2009



Dari empat kelompok tersebut, kelompok pertama terdiri dari Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Sorong. Terlihat disini Kabupaten Kaimana yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Fakfak ternyata mampu mengikuti perkembangan daerah induknya dan mempunyai kesamaan ciri dengan daerah induknya. Sementara Kabupaten Sorong yang merupakan kabupaten induk dari Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat ternyata masih terlalu jauh posisinya dan mempunyai perbedaan ciri dari kabupaten pecahannya.

Kabupaten ini justru lebih mempunyai kesamaan ciri capaian IPM dengan Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.

Kelompok kedua terdiri dari Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Teluk Wondama, Maybrat dan Raja Ampat. Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni merupakan kabupaten yang 'serumpun'. Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Ternyata capaian IPM ketiga kabupaten ini masih memiliki kesamaan ciri. Kelompok ke-dua ini ditambah dengan Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat yang masih tertinggal dari kabupaten induknya, Kabupaten Sorong. Kedua kabupaten tersebut justru memiliki kesamaan ciri dengan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Sorong. Sedangkan Kabupaten Maybrat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan ternyata masih memiliki kesamaan ciri dengan kabupaten induknya dan masuk kedalam kelompok yang sama.

Kelompok ketiga hanya terdiri dari Kota Sorong. Sebagai daerah yang memiliki status wilayah administrasi sebagai satu-satunya kota, tentunya Kota Sorong lebih maju dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kemajuan ini ternyata diikuti pula oleh kemajuan pembangunan manusianya. Sehingga Kota Sorong menjadi daerah di Papua Barat yang memiliki angka IPM tertinggi dan mempunyai perbedaan ciri dengan kabupaten lainnya.

Kelompok yang keempat ditempati sendiri oleh Kabupaten Tambrauw. Kabupaten ini sangat berbeda ciri dengan kabupaten/kota lainnya. Capaian IPM Kabupaten Tambrauw juga jauh dibawah wilayah lainnya begitu pula dengan kabupaten induknya.

5.2 Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dari hasil capaian IPM tahun 2007-2009 tampaknya Provinsi Papua Barat selalu ada di posisi urutan ke-30 dari 33 provinsi di Indonesia diatas Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Posisi ini tidak pernah bergerak naik untuk menggeser posisi provinsi diatas terdekatnya. Provinsi yang peringkatnya sedikit berada diatas Papua Barat adalah Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat.

Rendahnya peringkat Provinsi Papua Barat karena posisi kabupaten/kota didalamnya juga relatif rendah. Sebagian besar kabupaten di Papua Barat mempunyai peringkat diatas 400 dari sekitar hampir 500-an kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Posisi terbaik IPM di Provinsi Papua Barat tahun 2007-2009 selalu ditempati oleh Kota Sorong dan posisi terburuk ditempati oleh Kabupaten Raja Ampat (2007-2008) dan Kabupaten Tambrau (2009).

Perkembangan peringkat antar kabupaten/kota dalam Provinsi Papua Barat tidak mengalami banyak perubahan kecuali karena penambahan dua kabupaten yang baru dihitung capaian IPM-nya. Selain itu, perubahan yang terjadi adalah pergeseran antara peringkat 5 dan 6 atau perubahan posisi Kabupaten Manokwari ke peringkat lima dari peringkat enam yang pada periode sebelumnya ditempati oleh Kabupaten Sorong Selatan. Sebagai ibukota provinsi, Kabupaten Manokwari memiliki percepatan pertumbuhan capaian IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Tabel 5.1 IPM dan Peringkat Nasional IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009

Kabupaten/Kota	IPM			Peringkat Nasional		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fak-Fak	69,58	70,24	70.80	242	244	247
Kaimana	68,80	69,27	69.80	295	304	306
Teluk Wondama	63,40	64,79	65.27	430	441	449
Teluk Bintuni	64,40	65,29	65.65	421	438	446
Manokwari	64,17	65,46	66.20	423	434	437
Sorong Selatan	65,38	65,77	66.09	410	429	439
Sorong	67,21	67,82	68.16	360	367	382
Raja Ampat	62,47	63,57	64.08	437	452	462
Tambrau	-	-	49.12	-	-	489
Maybrat	-	-	64.89	-	-	454
Kota Sorong	75,59	76,52	76.84	36	30	30
Papua Barat	67,28	67,95	68.58	30	30	30

Sumber: Diolah dari Susenas 2007-2009

Perkembangan peringkat capaian IPM secara nasional menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua Barat menduduki peringkat bawah. Tujuh diantara 10 kabupaten/kota memiliki peringkat diatas 400. Sedangkan bila dilihat dari perkembangan peringkat tahun sebelumnya, terdapat fakta yang sangat menyedihkan. Tidak satupun kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang peringkat IPM-nya naik dibandingkan tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan capaian IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tidak secepat kabupaten/kota di provinsi lainnya.

5.3 Perbandingan Absolut Antar Daerah Dalam Diagram Kuadran

Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan ekonomi yang diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selamanya efisien bila tidak dibarengi dengan distribusi pendapatan yang merata.

Kemunculan paradigma pembangunan manusia seakan memberi pencerahan kepada pemerintah bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pencapaian kualitas sumber daya manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi juga wajib diperjuangkan. Baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia mestinya berjalan secara sinergis untuk mewujudkan tujuan akhir yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia di Papua Barat dapat diketahui dengan cara membuat diagram kuadran dengan mengkombinasikan capaian nilai IPM sebagai perwakilan keberhasilan pembangunan manusia dan sebagai representasi dari pembangunan ekonomi digunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang dipakai adalah atas dasar harga konstan 2000 tanpa menyertakan subsektor migas (tanpa migas) sedangkan PDRB per kapita yang digunakan adalah PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tanpa migas.

5.3.1 IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Diagram kuadran yang pertama adalah mengkombinasikan antara capaian IPM dengan pertumbuhan ekonomi. *Benchmark* yang

digunakan adalah nilai agregat IPM Provinsi Papua Barat dan nilai agregat pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat.

Pembentukan kuadran merupakan perpotongan antara sumbu absis atau sumbu X (IPM) dan sumbu ordinat atau sumbu Y (pertumbuhan ekonomi) dari angka agregat provinsi. Dari perpotongan dua sumbu koordinat tersebut diperoleh empat buah area yang menjadi kuadran-kuadran. Dimana kuadran-kuadran tersebut terbagi menjadi beberapa kriteria:

Kuadran I : IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi

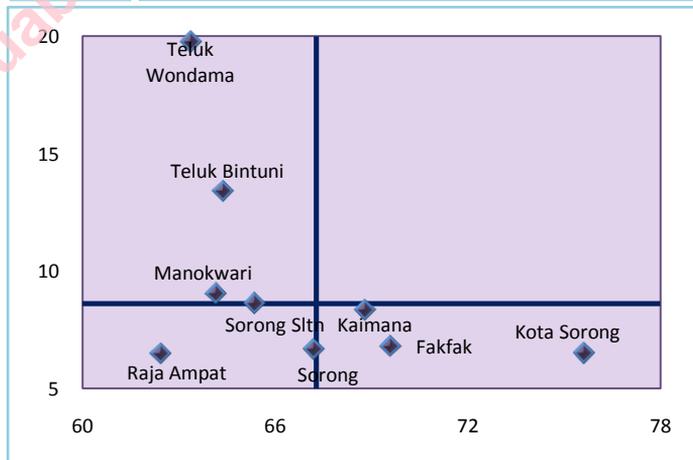
Kuadran II : IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi

Kuadran III : IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah

Kuadran IV : IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah

Gambar 5.3

Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat Tahun 2007



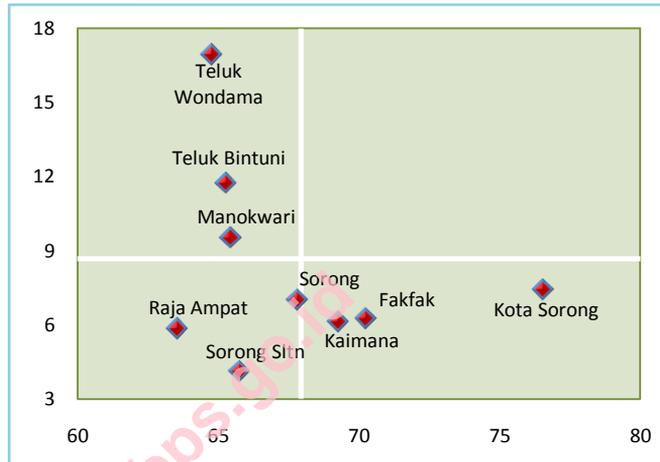
Gambar 5.3 adalah diagram kuadran yang menggambarkan kombinasi capaian nilai IPM tahun 2007 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2007. Pada kondisi tahun 2007 yang menjadi *starting point*, tidak satupun kabupaten/kota berada pada kuadran I. Kuadran ini menggambarkan kondisi terbaik suatu wilayah. Kuadran mempunyai ciri pertumbuhan ekonomi tinggi dan capaian IPM tinggi, sehingga dapat dikatakan pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi berjalan sinergi dan memperoleh titik optimum.

Posisi di kuadran II yang mempunyai ciri IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi ditempati oleh empat kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, dan Manokwari. Pertumbuhan ekonomi tinggi terutama terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. Dua kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Manokwari ini memang sedang berkembang menjadi kabupaten baru yang siap mensejajarkan diri dengan kabupaten induknya.

Di kuadran III, Kabupaten Sorong dan Raja Ampat berada didalamnya. Dapat dikatakan bahwa kuadran ini adalah kondisi terburuk bagi suatu daerah karena kuadran ini mempunyai ciri capaian IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah. Jadi pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi keduanya berjalan tidak optimal. Selanjutnya di kuadran IV yang mempunyai karakteristik capaian IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah ditempati oleh Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, dan Kota Sorong. Di kuadran ini pembangunan manusia berjalan dengan baik tetapi tidak didukung oleh pembangunan ekonomi yang mumpuni atau pertumbuhannya rendah.

Gambar 5.4

Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat Tahun 2008



Gambar 5.4 menjelaskan posisi absolut kabupaten/kota tahun 2008 pada diagram kuadran. Di tahun 2008 tidak banyak terjadi perubahan yang signifikan. Kuadran I yang memiliki karakteristik capaian IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi kondisinya masih sama seperti pada tahun 2007, tidak satupun kabupaten/kota menempati kuadran ini. Artinya bahwa selama tahun 2007-2008 tidak satupun kabupaten/kota yang mampu menjalankan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia secara simultan yang efisien karena tidak mampu untuk mengimbangi pertumbuhan dan capaian Provinsi Papua Barat.

Di kuadran II posisinya hampir sama dengan kondisi pada tahun 2007, perbedaannya posisi Kabupaten Sorong Selatan sekarang telah mengalami pergeseran ke kuadran III. Pergeseran Kabupaten Sorong Selatan disebabkan oleh perlambatan

pertumbuhan ekonomi yang hampir setengahnya dibandingkan dengan tahun 2007. Bersama dengan Kabupaten Sorong Selatan terdapat Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong yang posisinya tidak bergeser dari tahun sebelumnya.

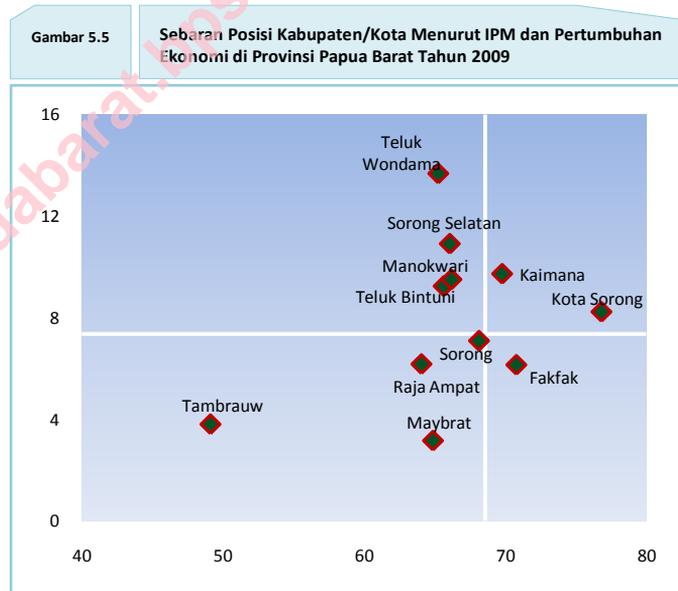
Kuadran IV pada tahun 2008 tidak mengalami perubahan posisi dibandingkan tahun 2007. Kuadran ini masih ditempati oleh Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana dan Kota Sorong.

Perubahan posisi kabupaten/kota yang terjadi pada tahun 2008 hanya terjadi di Kabupaten Sorong Selatan, itu pun mengalami pergerakan ke arah yang lebih buruk dari posisi tahun sebelumnya. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh kabupaten/kota tidak satupun yang mengalami perubahan ke posisi yang lebih baik dalam distribusi antar kuadran. Namun kondisi ini bukan berarti seluruh kabupaten/kota tidak mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia karena perubahan posisi antar kuadran kabupaten/kota sangat dipengaruhi oleh besarnya IPM dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat yang digunakan sebagai *benchmark*.

Di tahun 2009, telah dihitung besarnya capaian IPM Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. Dua kabupaten ini belum memberikan kontribusi yang cukup dalam hal pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Sebagai kabupaten yang baru dua kabupaten ini agak tertinggal dibandingkan dengan kabupaten induknya maupun kabupaten lain yang lebih dahulu mekar.

Beberapa perubahan posisi kabupaten/kota dalam diagram kuadran terjadi di tahun 2009. Salah satu penyebab perubahan

tersebut adalah berubahnya nilai *benchmark*. Penurunan nilai *benchmark* terjadi pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami penurunan dari 8,68 persen menjadi 7,36 persen. Di tahun 2009 ini nilai *benchmark* cenderung mengalami penurunan karena masuknya Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. Masuknya dua kabupaten ini menurunkan nilai *benchmark* karena capaian pertumbuhan ekonomi dan IPM-nya rendah. Terutama pada Kabupaten Tambrauw, daerah ini capaian IPM-nya hanya 49,12, sedangkan pertumbuhannya hanya mencapai 3,80 persen.



Di tahun 2009 terjadi perubahan pada susunan posisi kuadran-kuadran. Semula di tahun 2008 di kuadran pertama tidak ditempati oleh satupun kabupaten/kota. Namun di tahun 2009 Kabupaten

Kaimana dan Kota Sorong yang semula berada di kuadran IV bergeser posisi ke kuadran I. Artinya kedua kabupaten/kota tersebut mengalami perbaikan kondisi dengan ciri pertumbuhan ekonomi tinggi dan capaian IPM tinggi. Kedua wilayah ini dapat melampaui *benchmark* pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat bergeser ke kuadran I.

Pada kuadran II terjadi sedikit perubahan dibandingkan dengan tahun 2008. Di kuadran ini yang semula ditempati oleh Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Manokwari, kini Kabupaten Sorong Selatan ikut bergabung. Pergeseran posisi Kabupaten Sorong Selatan dari kuadran III ke kuadran II terutama dipengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2009. Sejak Kabupaten Maybrat memisahkan diri dari Kabupaten Sorong Selatan pertumbuhan ekonominya meningkat hingga melampaui *benchmark*.

Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat yang pada tahun 2008 menempati kuadran III, di tahun 2009 tetap tidak beranjak dari posisinya. Dua kabupaten baru untuk sementara masih berada di kuadran III yang mempunyai ciri paling buruk diantara kuadran-kuadran lainnya. Kedua kabupaten berada di kuadran ini karena capaian IPM dan pertumbuhan ekonominya masih berada dibawah *benchmark*.

Di kuadran IV hanya tinggal Kabupaten Fakfak yang ada didalamnya. Kabupaten ini belum mampu untuk melampaui *benchmark* pertumbuhan ekonomi, sehingga belum dapat melintas untuk bergeser ke kuadran I seperti halnya Kabupaten Kaimana dan Kota Sorong.

5.3.2 IPM Terhadap PDRB Per Kapita

Diagram kuadran yang kedua adalah mengkombinasikan antara capaian IPM dengan PDRB per kapita. *Benchmark* yang digunakan adalah nilai agregat IPM Provinsi Papua Barat dan nilai agregat PDRB per kapita Provinsi Papua Barat.

Pembentukan kuadran merupakan perpotongan antara sumbu absis atau sumbu X (IPM) dan sumbu ordinat atau sumbu Y (PDRB per kapita) dari angka agregat provinsi. Dari perpotongan dua sumbu koordinat tersebut diperoleh empat buah area yang menjadi kuadran-kuadran. Dimana kuadran-kuadran tersebut terbagi menjadi beberapa kriteria:

Kuadran I : IPM tinggi dan PDRB per kapita tinggi

Kuadran II : IPM rendah dan PDRB per kapita tinggi

Kuadran III : IPM rendah dan PDRB per kapita rendah

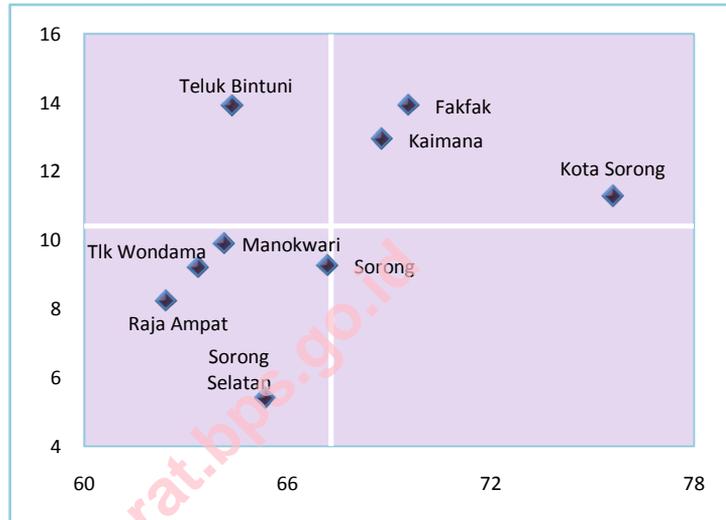
Kuadran IV : IPM tinggi dan PDRB per kapita rendah

Gambar 5.6 adalah diagram kuadran yang menggambarkan kombinasi capaian nilai IPM tahun 2007 dan PDRB per kapita tahun 2007. Kuadran I ditempati oleh Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana dan Kota Sorong. Ketiga kabupaten/kota ini mampu melampaui besaran *benchmark* capaian IPM maupun PDRB per kapita, sehingga dapat menempatkan posisi di kuadran I.

Kuadran II hanya ditempati oleh Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten ini memiliki PDRB per kapita yang cukup tinggi tetapi capaian IPM-nya rendah, sehingga hanya mampu menempatkan diri pada kuadran II.

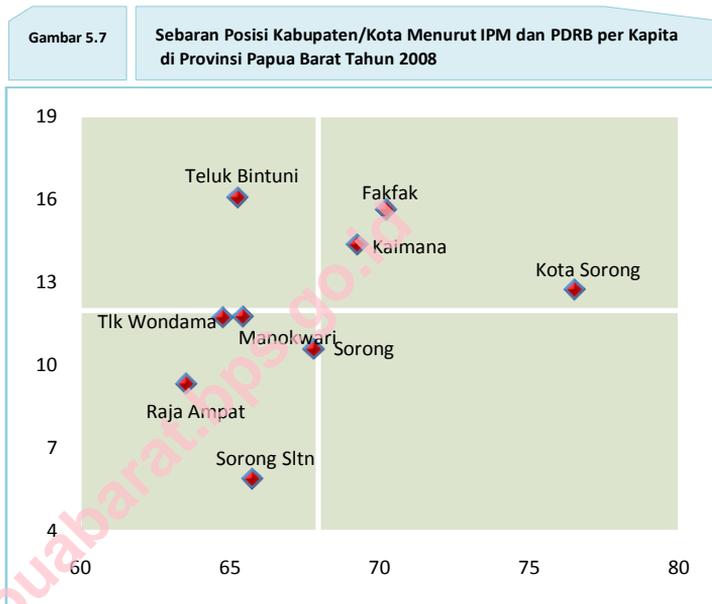
Gambar 5.6

Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan PDRB per Kapita di Provinsi Papua Barat Tahun 2007



Berbeda dengan kuadran II, di kuadran III ditempati oleh lima Kabupaten, yaitu Manokwari, Sorong, Teluk Wondama, Raja Ampat dan Sorong Selatan. Ironisnya adalah di kuadran III sebenarnya merupakan kuadran dengan ciri yang terburuk diantara kuadran-kuadran lainnya. Ciri kuadran ini adalah memiliki PDRB per kapita rendah dan capaian IPM yang rendah pula. Namun dilihat dari peluangnya, Kabupaten Manokwari berpeluang untuk memperbaiki posisinya untuk bergeser ke kuadran II di tahun mendatang karena telah sangat dekat dengan *benchmark* PDRB per kapita. Sedangkan Kabupaten Sorong memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya untuk bergeser ke kuadran IV pada tahun mendatang karena posisinya dekat dengan *benchmark* IPM.

Kuadran IV yang memiliki ciri PDRB per kapita rendah dan capaian IPM tinggi tidak ditempati oleh satupun kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat karena tidak ada yang memiliki ciri tersebut..



Sebaran posisi absolut antar kuadran kabupaten/kota tahun 2008 tidak mengalami perubahan dari kondisi tahun 2007. Perubahan-perubahan kecil hanya terjadi dalam kuadran, seperti contoh terjadi di Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten ini mengalami peningkatan PDRB per kapita cukup signifikan, disamping itu juga mengalami pertumbuhan capaian IPM. Posisi Kabupaten Teluk Wondama dalam kuadran III telah mendekati Kabupaten Manokwari dalam hal capaian PDRB per kapita, dan kedua kabupaten ini telah memiliki jarak yang sangat dekat dengan *benchmark* PBRB per kapita sehingga mempunyai peluang yang besar terjadi pergeseran ke kuadran II tahun berikutnya.

Gambar 5.8

Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan PDRB per Kapita di Provinsi Papua Barat Tahun 2009



Sebaran posisi kabupaten/kota di tahun 2009 sedikit mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2008. Perubahan hanya terjadi di kuadran II dan III. Kuadran I tetap seperti pada kondisi tahun 2008 hanya ditempati oleh Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, dan Kota Sorong. Sedangkan di kuadran IV tidak berpenghuni seperti sejak tahun 2007.

Di kuadran II yang hanya ditempati oleh Kabupaten Teluk Bintuni di tahun 2008 kini ditempati juga oleh Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Manokwari. Seperti diperkirakan sebelumnya, kedua kabupaten tersebut dapat melampaui *benchmark* PDRB per kapita sehingga bisa bergeser posisi ke kuadran II. Artinya bahwa kedua kabupaten ini telah mengalami peningkatan kualitas. Semula di tahun 2008 kedua kabupaten ini memiliki ciri PDRB per kapita rendah dan capaian IPM rendah. Kini kedua kabupaten ini mampu untuk

meningkatkan kinerja ekonomi dengan semakin meningkatnya PDRB per kapita sehingga dapat melampaui *benchmark*. Posisi kedua kabupaten ini bukan tidak mungkin untuk bergeser kembali ke kuadran IV karena jarak keduanya dengan *benchmark* PDRB per kapita masih sangat tipis. Jadi ketika *benchmark* PDRB per kapita di tahun berikutnya meningkat maka untuk tetap dapat bertahan di posisi yang sekarang kedua kabupaten tersebut juga harus memacu kinerja ekonominya sehingga capaian PDRB per kapita tidak terlampaui kembali oleh *benchmark*.

Sebaran posisi Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Maybrat dalam kudran masih berada di kuadran dengan ciri yang terburuk, yaitu di kuadran IV. Baik PDRB per kapita maupun capaian IPM kedua kabupaten ini masih belum mampu melampaui *benchmark*. Dilihat dari posisi *scatter* dalam diagram tampak bahwa kedua kabupaten ini masih tertinggal dari kabupaten/kota lain di Provinsi Papua Barat. Diperlukan kerja keras dalam kinerja sektor ekonomi maupun pembangunan manusia untuk dapat mengejar ketertinggalan dengan kabupaten/kota lainnya.

5.4 Analisis Indeks Disparitas Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

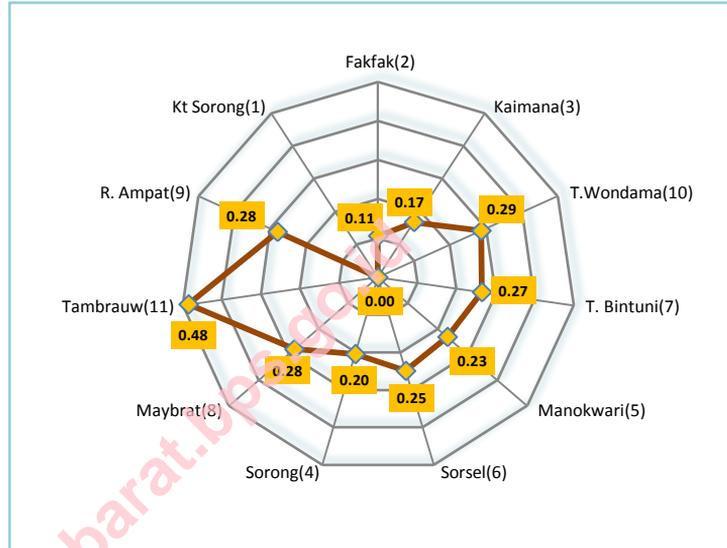
Penghitungan indeks disparitas pembangunan manusia dengan menggunakan Metode Taksonomik menghasilkan dua komponen indeks disparitas, yaitu Pola Pembangunan (*pattern of development*) dan Ukuran Pembangunan (*measure of development*). Kedua ukuran ini saling berkaitan dalam menentukan besaran indeks disparitas pembangunan manusia. Pola pembangunan digunakan untuk mengetahui karakteristik suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kabupaten/kota model,

dimana semakin tinggi nilai pola pembangunan yang dimiliki suatu kabupaten/kota mengindikasikan bahwa berbagai karakteristik yang dimiliki kabupaten/kota tersebut semakin jauh dari kabupaten/kota yang digunakan sebagai model/acuan (nilai pola pembangunan kabupaten/kota model sama dengan nol). Sedangkan ukuran pembangunan digunakan untuk menentukan peringkat indeks disparitas pembangunan manusia suatu kabupaten/kota yang diteliti, jika nilai dari ukuran pembangunan semakin mendekati 1 maka peringkat indeks disparitas pembangunan manusia kabupaten/kota tersebut semakin jauh dari kabupaten/kota acuan (dimana nilai ukuran pembangunan kabupaten/kota acuan sama dengan nol) atau dengan kata lain kabupaten/kota tersebut semakin tidak berkembang.

Terkait dengan pemilihan kabupaten/kota sebagai acuan, maka dipilih Kota Sorong sebagai acuan dari kabupaten/kota. Alasan pemilihan Kota Sorong menjadi acuan adalah karena Kota Sorong selalu unggul dari semua dimensi dalam komponen penyusun indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan Gambar 5.9, diketahui bahwa nilai ukuran pembangunan indeks disparitas berada pada rentang skala 0,00 hingga 0,48. Dalam gambar terlihat bahwa ukuran pembangunan tersebar dalam lima radius. Pusat radar adalah Kota Sorong sebagai daerah acuan dengan nilai ukuran pembangunan 0,00. Semakin jauh posisi kabupaten dari pusat radar maka semakin tertinggal kabupaten tersebut dalam hal pembangunan manusia. Kabupaten terdekat adalah Kabupaten Fakfak yang terletak pada radius kedua dalam radar. Ini menunjukkan meskipun Kabupaten Fakfak berada pada peringkat kedua namun jarak antara ukuran pembangunan dengan Kota Sorong relatif cukup jauh.

Gambar 5.9

Ukuran Pembangunan dan Peringkat Indeks Disparitas Pembangunan Manusia Tahun 2009


Jarak kabupaten terjauh dari daerah acuan adalah Kabupaten Tambrauw. Kabupaten ini berada pada radius ke-5 dan hampir mendekati radius ke-6. Jauhnya jarak antara Kabupaten Tambrauw dengan Kota Sorong sebagai daerah acuan memberikan informasi bahwa Kabupaten Tambrauw sangat jauh ketinggalan dalam hal pembangunan manusia dari Kota Sorong yang merupakan peringkat pertama.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

Situasi Pembangunan Manusia:

Kesehatan

1. Angka harapan hidup Provinsi Papua Barat dari tahun 2007-2009 cenderung mengalami peningkatan.
2. Angka harapan hidup tertinggi di Kota Sorong sebesar 71,53 tahun dan terendah di Kabupaten Raja Ampat sebesar 65,75 tahun.
3. Indeks derajat kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2009 sebesar 72,00.

Pendidikan

1. Angka melek huruf selama periode 2007-2009 terus menunjukkan peningkatan.
2. Peningkatan angka melek huruf terjadi di seluruh kabupaten/kota.
3. Perkembangan rata-rata lama sekolah selama periode 2007-2009 meningkat dari 7,65 tahun pada tahun 2007 menjadi 7,67 tahun pada tahun 2008 dan menjadi 8,01 tahun pada tahun 2009. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah termasuk rendah karena rata-rata lama sekolah hanya mencapai kelas 2 SMP.

4. Indeks pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2009 sebesar 79,36.

Kemampuan Daya Beli

1. Paritas daya beli Provinsi Papua Barat tahun 2009 adalah sebesar Rp. 595.280,- meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2008 yang mencatat paritas daya beli sebesar Rp 593.130,-.
2. Indeks paritas daya beli tahun 2009 sebesar 54,37.

Gambaran IPM Papua Barat Tahun 2009:

1. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2009 meningkat dari tahun sebelumnya dari 67,95 menjadi 68,58..
2. Peningkatan IPM Provinsi Papua Barat disebabkan oleh peningkatan ketiga dimensi IPM yaitu umur panjang, pengetahuan, dan kemampuan daya beli.
3. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2009 menempati peringkat 30 dari 33 provinsi di Indonesia.
4. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2009 termasuk dalam kategori menengah dengan capaian 68,58 dalam skala 0 – 100.
5. IPM tertinggi di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2009 diraih oleh Kota Sorong dengan indeks 76,84 dalam skala 0 – 100.
6. IPM terendah di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2009 diraih oleh Kabupaten Tambrauw dengan indeks 49,12 dalam skala 0 – 100.

7. Berdasarkan kriteria UNDP, kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok menengah dan kelompok bawah.
8. Kelompok IPM menengah terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Raja Ampat.
9. Kelompok IPM bawah terdiri dari Kabupaten Tambrau.

<http://papuabarat.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Bakrie, Aburizal, (2006), "Mengapa Pembangunan Manusia?" Kompas, 24 Mei 2006.
- BPS. 2005. *Indikator Statistik Bidang Sosial Menurut Jenis dan Penggunaannya*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- . 2006. *Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006 Buku 2 (Kabupaten)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- . 2009. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2008*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- . 2008. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2007*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- , (1996), *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 1996*, Jakarta.
- , (2001), *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001*, Jakarta.
- , (2004), *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2004*, Jakarta.
- . 2006. *Statistik Pendidikan 2006*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- , Bappenas, dan UNDP, (1990), *Laporan Pembangunan Manusia 1990*, Jakarta.
- . 2007. *Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS*. BPS: Jakarta.
- . 2008. *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*. BPS: Jakarta.

----- . 2009. *Analisis Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi*. BPS: Jakarta

BPS Provinsi Papua Barat, (2009), *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2008*, BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari

----- . (2008), *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahun 2007*, BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari

----- , (2009), *Papua Barat dalam Angka Tahun 2009*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.

----- . 2009. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha 2008*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.

----- . 2008. *Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2007*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.

----- . 2008. *Profil Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.

----- . 2007. *Tingkat Keperahan Kemiskinan Provinsi Papua Barat 2007*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.

Depdiknas. 2005. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Depdiknas: Jakarta

----- . 2006. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*. Depdiknas: Jakarta.

----- . 2009. www.depdiknas.go.id

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. *Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goal Indonesia 2007*. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.

UNDP. 2009. *Human Development Report 2009: Overcoming Barriers: Human Mobility and Development*. United Nation Development programme: New York, USA

<http://papuabarat.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator dan Sumber Data Pendukung yang Digunakan Dalam Penghitungan IPM

Indikator	Sumber Data
(1)	(2)
A. Kesehatan	
1. Angka Harapan Hidup	Susenas 2007-2009
2. Persentase Penduduk dengan Keluhan Kesehatan	Susenas 2007-2009
3. Angka Kematian Bayi	Susenas 2007-2009
4. Penolong Kelahiran	Susenas 2007-2009
5. Persentase Balita yang Diimunisasi	Susenas 2007-2009
6. Jumlah Tenaga Kesehatan	Dinkes Papua barat 2009
7. Jumlah Sarana Kesehatan	Dinkes Papua barat 2009
8. Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum	Susenas 2007-2009
9. Persentase Penggunaan fasilitas Tempat Buang Air	Susenas 2007-2009
B. Pendidikan	
1. Angka Melek Huruf	Susenas 2007-2009
2. Rata-rata Lama Sekolah	Susenas 2007-2009
3. Angka Partisipasi Sekolah	Susenas 2007-2009
4. Tingkat Pendidikan	Susenas 2007-2009
5. Angka Putus Sekolah	Kemendiknas 2008
6. Rasio-rasio Pendidikan	Kemendiknas 2008
7. Tingkat Kelulusan Siswa	Kemendiknas 2008
C. Perekonomian	
1. PDRB ADHB dan ADHK	PDRB 2009
2. PDRB per Kapita	PDRB 2009
3. Pertumbuhan Ekonomi	PDRB 2009
4. Struktur Ekonomi	PDRB 2009

Lampiran 2. Konversi Tingkat Pendidikan Menjadi Rata-rata Lama Sekolah

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Lama Sekolah
Tidak/Belum tamat SD	0
Tamat SD/Sederajat	6
Tamat SMP/Sederajat	9
Tamat SMA/Sederajat	12
Tamat Diploma I	13
Tamat Diploma II	14
Tamat Diploma III	15
Tamat Sarjana/Diploma IV	16
Tamat S2	18
Tamat S3	21

Lampiran 3. Skor Variabel Kualitas dan Fasilitas Rumah dalam Penghitungan Paritas Daya Beli

No	Variabel	Karakteristik	Skor
1	Jenis lantai	Keramik, Marmer, atau Granit	1
		Lainnya	0
2	Luas lantai per kapita	Lebih dari 10 m ²	1
		Lainnya	0
3	Jenis dinding terluas	Tembok	1
		Lainnya	0
4	Jenis atap terluas	Beton/Kayu/Genteng	1
		Lainnya	0
5	Fasilitas penerangan	Listrik	1
		Lainnya	0
6	Fasilitas air minum	Ledeng	1
		Lainnya	0
7	Fasilitas jamban	Milik sendiri	1
		Lainnya	0
8	Skor awal setiap rumah	Rumah	1
		Lainnya	0

Lampiran 4. Daftar Paket Komoditi yang Digunakan untuk Menghitung Paritas Daya Beli

No	Komoditi	Unit	Proporsi dari Total Konsumsi (%)
1	Beras Lokal	Kg	7,25
2	Tepung Terigu	Kg	0,10
3	Singkong	Kg	0,22
4	Tuna/Cakalang	Kg	0,50
5	Teri	Ons	0,32
6	Daging Sapi	Kg	0,78
7	Ayam	Kg	0,65
8	Telur	butir	1,48
9	Susu Kental Manis	397 gram	0,48
10	Bayam	Kg	0,30
11	Kacang Panjang	Kg	0,32
12	Kacang Tanah	Kg	0,22
13	Tempe	Kg	0,79
14	Jeruk	Kg	0,39
15	Pepaya	Kg	0,18
16	Kelapa	butir	0,56
17	Gula	Ons	1,61
18	Kopi	Ons	0,60
19	Garam	Ons	0,15
20	Merica	Ons	0,13
21	Mie Instan	80 gram	0,79
22	Rokok Kretek	10 batang	2,86
23	Listrik	Kwh	2,06
24	Air Minum	M ³	0,46
25	Bensin	liter	1,02
26	Minyak Tanah	liter	1,74
27	Sewa rumah	unit	11,56
Total			37,52

Lampiran 5. Rata-rata Jumlah Hari Sakit pada Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2009.

Kabupaten/kota	Lama hari sakit (hari)				Total
	<= 3	4 - 7	8 - 14	> 15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Fakfak	55.45	37.90	4.71	1.94	100.00
Kab. Kaimana	57.39	41.51	0.00	1.10	100.00
Kab. Teluk Wondama	31.84	54.94	9.94	3.28	100.00
Kab. Teluk Bintuni	70.77	21.83	4.47	2.93	100.00
Kab. Manokwari	57.17	35.52	3.83	3.48	100.00
Kab. Sorong Selatan	73.47	23.97	1.91	0.66	100.00
Kab. Sorong	65.32	24.58	6.96	3.14	100.00
Kab. Raja Ampat	59.65	35.89	3.56	0.89	100.00
Kota Sorong	51.57	41.09	4.32	3.01	100.00
Prov. Papua Barat	58.39	34.44	4.36	2.82	100.00

Lampiran 6. Persentase Cara Pengobatan yang Dilakukan Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2009.

Kabupaten/Kota	Pengobatan Sendiri	Pengobatan ke Sarana Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Fakfak	92.85	7.15	100,00
Kab. Kaimana	64.81	35.19	100,00
Kab. Teluk Wondama	50.49	49.51	100,00
Kab. Teluk Bintuni	39.26	60.74	100,00
Kab. Manokwari	68.78	31.22	100,00
Kab. Sorong Selatan	73.07	26.93	100,00
Kab. Sorong	73.98	26.02	100,00
Kab. Raja Ampat	31.97	68.03	100,00
Kota Sorong	62.85	37.15	100,00
Prov. Papua Barat	64.15	35.85	100,00

Lampiran 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Tempat pembuangan akhir tinja						Jumlah
	Tangki/ SPAL	Kolam/ sawah	Sungai/ danau/ laut	Lobang tanah	Pantai/ tanah lapang/ kebun	Lain nya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Fakfak	50.40	0.00	21.87	21.27	6.06	0.40	100.00
Kab. Kaimana	32.39	0.77	3.25	35.09	28.50	0.00	100.00
Kab. Teluk Wondama	55.52	1.61	19.64	16.03	7.20	0.00	100.00
Kab. Teluk Bintuni	40.53	0.87	19.02	37.85	1.31	0.43	100.00
Kab. Manokwari	57.45	0.16	6.77	24.00	11.46	0.16	100.00
Kab. Sorong Selatan	23.45	1.56	31.26	41.12	0.00	2.60	100.00
Kab. Sorong	36.97	3.13	13.54	33.86	11.98	0.52	100.00
Kab. Raja Ampat	47.96	1.04	11.47	36.41	2.60	0.52	100.00
Kota Sorong	91.22	0.40	2.79	2.66	2.93	0.00	100.00
Papua Barat	55.09	0.91	11.69	24.01	7.87	0.43	100.00

DATA

Mencerdaskan Bangsa

<http://papuabarat.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT

Jln. Trikora Sowi IV - Manokwari - Papua Barat - 98315

Telp. 0986.2702414, 213995 Fax. 0986.213038

E-mail : bps9100@bps.go.id

Homepage : www.lrjabar.bps.go.id